

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE*  
INDONESIAN STANDAR (QRIS) PADA SEKTOR UMKM  
DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

**SKRIPSI**

Oleh:

AYUNDA AZHARI  
NIM. 0501172136

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M / 1443 H**

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE*  
*INDONESIAN STANDAR (QRIS)* PADA SEKTOR UMKM DI KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Oleh:

AYUNDA AZHARI  
NIM. 0501172136

Program Studi

**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunda Azhari  
Nim : 0501172136  
Tempat/tgl. Lahir : Ujung Maligas, 25 September 1999  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Desa Ujung Maligas Kel. Maligas Bayu, Kec.  
Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun, Sumatera  
Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDAR* (QRIS) PADA SEKTOR UMKM DI KOTA PEMATANGSIANTAR)”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Desember 2021

Yang membuat pernyataan

**Ayunda Azhari**

**PERSETUJUAN**  
Skripsi Berjudul  
**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE***  
***INDONESIAN STANDAR (QRIS)* PADA SEKTOR UMKM**  
**DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

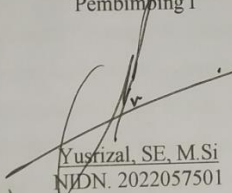
Oleh:

Ayunda Azhari  
NIM. 0501172136

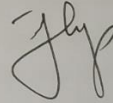
Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 15 Desember 2021

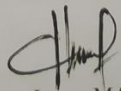
Pembimbing I

  
Yusrizal, SE, M.Si  
NIDN. 2022057501

Pembimbing II

  
Muhammad Ikhsan Harahap, MEI  
NIDN. 0105018901

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

  
Imsar, M.Si  
NIDN. 2003038701

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDAR (QRIS) PADA SEKTOR UMKM DI KOTA PEMATANGSIANTAR**" atas nama Ayunda Azhari, NIM. 0501172136, Program Studi Ekonomi Islam telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

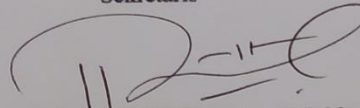
Medan, 26 Januari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua



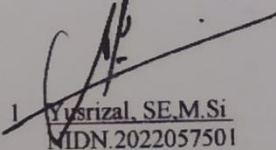
Imsar, M.Si  
NIDN. 2003038701

Sekretaris

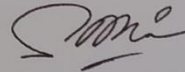


Rahmat Daim Harahap, M.Ak  
NIDN. 0126099001

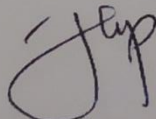
Anggota :



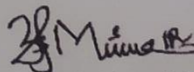
1. Yusrizal, SE, M.Si  
NIDN. 2022057501



3. Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA  
NIDN. 2004127204



2. Muhammad Ikhsan Harahap, MEI  
NIDN. 0105018901



4. Mawaddah Irfham, MEI  
NIDN. 2014048601

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN-SU

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

**Ayunda Azhari. Nim 0501172136. “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)* Pada Sektor UMKM di Kota Pematangsiantar”. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Yusrizal, SE, M.Si dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak Muhammad Ikhsan Harahap MEI.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, *pertama*, pengetahuan pelaku UMKM di Pematangsiantar menggunakan QRIS, *kedua*, manfaat dalam menggunakan QRIS terhadap pelaku UMKM dan *ketiga* hambatan pelaku UMKM di kota Pematangsiantar dalam penggunaan QRIS. Jenis penelitian in menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, pelaku UMKM di kota Pematangsiantar mayoritas mengetahui QRIS sebagai alat pembayaran digital yang dikeluarkan Bank Indonesia, QRIS ini memberikan kelebihan dibanding sistem pembayaran digital lainnya. *Kedua*, adanya QRIS membantu *merchant* (UMKM) untuk melakukan pembayaran lebih praktis, cepat dan aman serta dengan adanya kemudahan transaksi tersebut masyarakat memilih berbelanja dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. *Ketiga*, jaringan internet yang kurang stabil dalam melakukan transaksi sehingga menjadi kendala bagi pelaku UMKM dan juga konsumen dalam melakukan transaksi. Serta adanya biaya *merchant discount rate (Mdr)* sebesar 0,07% yang di berlakukan kepada para pedagang menjadi hambatan pelaku UMKM di Pematangsiantar.

**Kata Kunci: UMKM, QRIS, Sistem Pembayaran.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDAR* (QRIS) PADA SEKTOR UMKM DI KOTA PEMATANGSIANTAR”** adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Islam. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW karena berkatnyalah kita dapat terbebas dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk dua orang yang sangat berharga dan sangat berpengaruh dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Kuseri dan Ibunda Suwarni yang selalu menyayangi, memberikan dukungan moral maupun materi, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi dan nasihat serta senantiasa melimpahkan doa yang tak ada batasnya untuk penulis dari dilahirkan ke dunia sampai sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Yusrizal SE, M.Si selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta banyak memberikan bimbingan dan masukan dari awal penulisan skripsi ini sampai selesai
5. Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.EI selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu saya di dalam perkuliahan.
7. Orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis yaitu, kakak Elsa Audina S.Si, abang Herman Syahputra S.Si dan adik Nur Aulia Al-Fitrah.
8. Orang-orang yang penulis sayangi, sahabat-sahabat yang penulis sayangi yaitu Shasha Fadillah, Noni Novita Sari Silalahi, Lisa Khairani, dan Kristanti Widayani yang selalu mendukung dan mengingatkan serta memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Cut Lisa Andari, Himmatul Ulya, Lolika, Qanaah Infithaar Khusyu Haq, Mutiara Zafira Mufthi dan keluarga besar Ekonomi Islam G 2017 yang senantiasa selalu membantu penulis dengan memberi saran, masukan, memberikan semangat, motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. EXO, BTS, Tulus dan Coldplay yang memberikan semangat kepada penulis melalui karya seni.
11. *Last but not Least*, terimakasih kepada diriku yang telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena telah berusaha bangkit disaat jatuh, terimakasih telah berusaha mempercayai kemampuan diriku,terimakasih untuk segala hal yang tak pernah terucapkan oleh kata tapi selalu dirasakan oleh jiwa.  
*Thank you my self, you've tried your best. You've made it.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.Akhir kata, penulis



menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 November 2021  
Penulis

**Ayunda Azhari**  
**NIM. 0501172136**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Landasan Teoritis .....	9
1. Sistem Pembayaran.....	9
a. Pengertian Sistem Pembayaran.....	9
b. Sejarah Sistem Pembayaran.....	11
c. Jenis-jenis Sistem Pembayaran.....	18
d. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran .....	29
e. Sistem Pembayaran Menurut Perspektif Islam.....	30
2. UMKM.....	32
a. Pengertian UMKM.....	32
b. Kriteria UMKM .....	34
c. Klasifikasi UMKM .....	34
d. Peranan UMKM.....	35
e. Karakteristik UMKM.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Teoritis .....	47

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
C. Subjek penelitian.....	50
D. Sumber Data Penelitian .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Keabsahan Data.....	55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kota Pematangsiantar .....	59
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kota Pematangsiantar per Kecamatan.....	4
Tabel 2.1 Contoh Alat Pembayaran.....	21
Tabel 2.2 Jumlah UMKM di Indonesia.....	34
Tabel 2.3 Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 .....	34
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	50
Tabel 3.2 Identitas Informan .....	50
Tabel 4.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menggunakan QRIS per Kecamatan.....	61
Tabel 4.2 Jumlah Unit Industri Besar/Sedang dan Industri Kecil 2020.....	62

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

Gambar 2.1 Gambaran Sebelum dan Sesudah <i>Merchant</i> Menggunakan QRIS ....	29
Gambar 2.2 Kerangka Teoritis .....	47
Gambar 4.1 UMKM Kota Pematangsiantar Tahun 2020 .....	60
Gambar 4.2 Wawancara terhadap Pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar .....	64
Gambar 4.3 Wawancara Pelaku UMKM terkait Pengetahuan UMKM terhadap QRIS .....	66
Gambar 4.4 Barcode QRIS pedagang UMKM di Pematangsiantar .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akan ada banyak perubahan di berbagai sektor sepanjang revolusi industri 4.0, baik yang disiapkan maupun tidak. Dunia usaha merupakan salah satu yang akan terkena dampak dari perkembangan tersebut. Jelas, sektor usaha akan mengalami beberapa perubahan, termasuk yang mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu faktor yang akan mengubah dan berdampak pada sektor bisnis adalah *Internet of Things (IoT)*, yang menekankan pentingnya penggunaan internet di dalam unit usaha. Berbagai bentuk usaha mikro juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan pada masa ini, salah satunya dengan mulai melakukan operasional usaha melalui internet.<sup>1</sup>

Dunia usaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan di era revolusi 4.0 agar usaha tersebut dapat bertahan, salah satu upayanya yaitu dengan melakukan pemasaran melalui internet dan mengubah kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara online dibandingkan offline.<sup>2</sup>

Dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang krusial, sebanyak 56,54 juta unit UMKM atau setara dengan 99,99% dari total pelaku usaha memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Ketika krisis moneter 1998 melanda Indonesia, usaha kecil dan menengah terbukti lebih tangguh daripada perusahaan besar, karena usaha mikro kecil menengah tidak tergantung pada mata uang asing untuk mendapatkan pinjaman atau modal yang besar, sehingga pada saat mata uang asing mengalami fluktuasi, usaha ini tidak terlalu terdampak dan sebaliknya fluktuasi mata uang asing akan sangat berdampak pada perusahaan-perusahaan berkala besar karena mereka membutuhkan pinjaman modal yang cukup besar untuk operasionalnya dan ketika mata uang asing mengalami fluktuasi maka perusahaan-perusahaan besar tersebut

---

<sup>1</sup> Wulan Ayodya, *UMKM 4.0 (Strategi UMKM Memasuki Era Digital)*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2020), h. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 2.

akan mengalami krisis yang sangat parah bahkan perusahaan tersebut bisa mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi informasi telah menggeser sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia dari pedesaan ke perkotaan. Dalam kehidupan sehari-hari *smartphone* lebih sering dimanfaatkan oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan generasi sekarang lebih cenderung memanfaatkan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat hampir setiap saat konsumen melakukan kontak dan percakapan dengan ponselnya, baik melalui saluran seluler maupun media sosial. Hampir semua aktivitas sehari-hari terkait erat dengan *smartphone*, karena semuanya terhubung ke Internet. Masyarakat menggunakan ponsel pintar untuk berbagai aktivitas, termasuk menelepon dan mengirim SMS (layanan pesan singkat), berkomunikasi di media sosial, melakukan bisnis, dan menyelesaikan transaksi keuangan secara online.<sup>4</sup>

Di era digitalisasi saat ini, masyarakat tidak dapat menghindari kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Manusia dipaksa oleh era global untuk terus mengembangkan teknologi yang menyederhanakan dan, dalam beberapa kasus, sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia, termasuk transaksi keuangan.<sup>5</sup> Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang begitu cepat membuat alat pembayaran digital juga berkembang dengan pesat. Baik secara lokal maupun global, penggunaan teknologi modern sebagai alat pembayaran nontunai meningkat pesat, disertai dengan beberapa penyempurnaan yang menjadikan penggunaannya lebih efisien, aman, cepat, dan mudah.

Uang elektronik (*electronic money/e-money*) dan uang virtual (*virtual money*) merupakan salah satu instrument pembayaran yang lahir berkat perkembangan teknologi, jenis uang ini merupakan jawaban atas kebutuhan alat pembayaran mikro yang mampu memproses transaksi dengan cepat dan biaya rendah karena nilai uang yang disimpan, alat ini dapat disimpan pada media

---

<sup>3</sup> LPPI dan BI, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), h. 5.

<sup>4</sup> Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*, t.t, h. 1.

<sup>5</sup> Muhammad Ikhsan Harahap, *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah*, Laporan Penelitian (2020), h. 43.

tertentu yang dapat diambil dengan aman, murah dan cepat. Selain itu, lahirnya uang elektronik ini juga dipelopori oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang tunai ( *less cash society* ) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut data Bank Indonesia tahun 2019, uang elektronik memimpin pembayaran nontunai dengan transaksi 95,75 triliun, naik dari 60,00 triliun pada tahun sebelumnya (2018). Uang elektronik banyak digunakan untuk pembayaran nontunai sebagai akibat dari perkembangan produk uang elektronik, yang meliputi kartu *e-money* berbasis *chip* dan *server*, serta aplikasi *e-wallet* dan rekening bank.<sup>6</sup> Pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik menjadi suatu peluang yang saat ini digunakan oleh para penggunanya untuk meminimalkan menggunakan transaksi secara tunai. Uang elektronik memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman daripada uang tunai, terutama untuk transaksi bernilai kecil, karena memungkinkan transaksi menjadi lebih praktis, cepat dan hemat biaya sekaligus memastikan keamanan konsumen dan pedagang serta kecepatan transaksi.

Saat ini, terdapat beberapa penerbit uang elektronik (*electronic money*) yang beroperasi di Indonesia sebagai alat pembayaran nontunai yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor usaha, antara lain Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja. Maraknya aplikasi alat pembayaran nontunai menyulitkan merchant untuk menyediakan alat pembayaran yang banyak digunakan, dan sebelum munculnya QRIS, beberapa jenis QR Code memenuhi kasir untuk menyediakan layanan sistem pembayaran nontunai. Oleh karena itu, pada peringatan HUT RI ke-74, 17 Agustus 2019, Bank Indonesia memperkenalkan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) sebagai standar pemersatu seluruh aplikasi pembayaran berbasis QR Code.

QRIS dapat beroperasi pada semua merchant yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Pengguna aplikasi *e-wallet* seperti Dana, LinkAja, Gopay dan OVO dapat melakukan transaksi dengan toko

---

<sup>6</sup> Josef Evan Sihaloho, et.al, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM di Medan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.17. No.2, April 2020. h. 288.



atau merchant dengan cara melakukan scan kode QRIS yang disediakan oleh merchant menggunakan satu jenis aplikasi *e-wallet* (contoh pengguna menggunakan link aja) tanpa mengganti aplikasi yang sesuai dengan penyedia layanan QRIS di toko (QRIS di merchant berasal dari Shopee) karena sistem QRIS ini beroperasi dalam *Merchant Presented Mode* (MPM). Dengan demikian, transaksi pembayaran dapat dilakukan lebih efisien atau terjangkau, inklusi keuangan di Indonesia dapat dipercepat, dan UMKM dapat menjadi lebih canggih, yang semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup>

Kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Pematangsiantar. Kota Pematangsiantar terletak strategis karena dilalui oleh Jalan Raya Trans Sumatera dan berjarak sekitar 128 km dari kota Medan. Di Kota Pematangsiantar terdapat 268.254 jiwa penduduk yang mendiami wilayah seluas 79,97 km<sup>2</sup>. Kota terbesar kedua ini merupakan kota dengan pemilik UMKM yang cukup banyak dan tersebar di 8 kecamatan dengan 53 kelurahan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan jumlah UMKM yang ada di kota Siantar:<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah usaha mikro kecil dan menengah di kota**  
**Pematangsiantar per kecamatan**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
1	Siantar Marihat	1.681
2	Siantar Marimbun	1.241
3	Siantar Selatan	1.531
4	Siantar Barat	3.363
5	Siantar Utara	2.424
6	Siantar Timur	2.623
7	Siantar Martoba	1.283
8	Siantar Sitalasari	1.996
<b>Jumlah</b>		<b>16.142</b>

*Sumber: Data Tahunan 2016 Dinas Koperasi dan UMKM kota Pematangsiantar*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap kecamatan di Pematangsiantar memiliki perbedaan dalam jumlah UMKM, dimana Kecamatan

<sup>7</sup>Bank Indonesia, “Setelah Bunga Acuan Turun, Masih Ribet dengan Banyak QR Code?,” dalam Majalah Bank Indonesia Bicara (2019), h. 3

<sup>8</sup>Robert Tua Siregar, Herry Pandopotan Silitonga, dan Juan Anastasia Putri, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pematangsiantar, *Jurnal Konsep Manajemen dan Bisnis*, 6 (2) Mei 2020. h. 134.

Siantar Marimbun menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM terendah yaitu 1.241 UMKM dan kecamatan Siantar Barat menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu sekitar 3.633 UMKM. Setiap kecamatan di Pematangsiantar juga memiliki sektor unggulan yang berbeda. Toko Kelontong, ATK dan Warnet, serta Warung Makan dan Minuman merupakan sektor unggulan di Kabupaten Siantar Martoba. Toko Kelontong dan Warung Makanan dan Minuman adalah dua jenis sektor unggulan di Kecamatan Siantar Marimbun. Sektor Unggulan di Kabupaten Siantar Timur adalah Usaha Pangan Pokok dan Usaha Kuliner Makanan dan Minuman, karena sebagian besar penduduknya bekerja di luar atau membuka usaha sehingga tidak memiliki waktu untuk membeli di pasar dan mempersiapkannya di rumah. Industri Tahu dan Hasil Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Siantar Sitalasari. Usaha Makanan dan Minuman merupakan salah satu sektor yang dapat diunggulkan di Kabupaten Siantar Marihat. Kabupaten Siantar Selatan yang jauh dari pasar dan tingkat aktivitas penduduk yang tinggi, Toko Kelontong dan Usaha Makanan dan Minuman mendominasi. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu yang dapat diunggulkan di Kabupaten Siantar Barat. Gerai makanan dan usaha tenun ulos merupakan usaha unggulan di Kecamatan Siantar Utara.<sup>9</sup>

Implementasi sistem pembayaran non tunai yang digunakan untuk pembayaran secara *online* maupun *offline*, diiringi dengan pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat, hal ini akan memudahkan dalam melakukan transaksi antara pelanggan dan pelaku UMKM. Dengan menggunakan *QR Code*, sistem pembayaran QRIS ini digunakan untuk menstandarisasi semua pembayaran non tunai. Salah satu alasan pengembangan sistem pembayaran ini adalah karena pelaku UMKM harus menawarkan beberapa *QR Code* dari berbagai penerbit saat melakukan transaksi non-tunai. Dengan adanya beberapa macam aplikasi dompet digital, menyebabkan penjual perlu menyediakan beberapa layanan kode QR sebanyak jumlah aplikasi dompet digital yang tersedia untuk

---

<sup>9</sup>Ady Imrawan dkk. Analisis Peluang Usaha di Kota Pematangsiantar Menghadapi Destinasi Wisata Danau Toba, *e-jurnal binawakarya*, Vol.15 No 1, Mei 2021, h. 5489-5490.

dapat dipindai oleh masing-masing aplikasi tersebut. Sedangkan, dengan adanya berbagai macam kode QR yang disediakan oleh penjual menyebabkan konsumen memiliki kerepotan sendiri untuk melakukan pemindaian kode QR, karena syarat dan ketentuan masing-masing kode QR yang berbeda-beda.

Fenomena tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Untuk mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran digital di Indonesia yang disebut QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*). Hal ini memungkinkan *merchant* (UMKM) untuk melakukan transaksi atau pembayaran nontunai dengan pembeli secara lebih efisien dengan penggunaan QRIS. QRIS bisa dimanfaatkan melalui aplikasi pembayaran yang terpasang di telepon genggam yang terkoneksi dengan internet. Keuntungan menggunakan QRIS adalah memudahkan UMKM memberikan uang kembalian kepada konsumen dan mengurangi kebiasaan untuk membawa uang tunai saat berbelanja. Selain itu, pembayaran non-tunai melindungi pelaku usaha dari penerimaan uang palsu selama transaksi.

Ketertarikan masyarakat menggunakan QRIS setelah tahu fungsinya, menimbulkan animo yang tinggi dari masyarakat Indonesia salah satunya kota Pematangsiantar, yang mayoritas terdiri dari generasi milenial untuk dapat bertransaksi dalam pembayaran digital secara mudah, cepat dan aman.<sup>10</sup>

Penggunaan QRIS di kota Pematangsiantar tergolong cukup banyak bila dibandingkan kota-kota lainnya di Sumatera Utara atau di bawah kota Medan, yang cenderung sudah melek digital. Kepala Kpw BI Pematangsiantar, Edhi Rahmanto Hidayat mengatakan penggunaan QRIS di wilayah kerjanya yang meliputi 8 Kabupaten/Kota Sisi Batas Labuhan ( Siantar, Simalungun, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu selatan) per Desember 2020 pengguna QRIS mencapai 28971 *merchant*. Adapun

---

<sup>10</sup> Oktoviana Banda Saputri, Preferensi konsumen dalam menggunakan *quick response code indonesia standard* (qris) sebagai alat pembayaran digital, *journal feb unmul, KINERJA* 17 (2), 2020, h. 237-247.

total transaksinya mencapai Rp 1 miliar lebih. Khusus Kota Pematangsiantar pengguna QRIS ada 7304 *merchant* (UMKM) dengan transaksi Rp 454.063.789. Kota Pematangsiantar adalah yang terbanyak bila dibandingkan daerah lain dalam zona Sisibatas Labuhan.<sup>11</sup>

Dilihat dari jumlah pelaku UMKM di kota Pematangsiantar pengguna QRIS tergolong cukup besar setelah kota Medan. Berawal dari ini peneliti ingin mengetahui penerapan digitalisasi dari segi transaksi oleh beberapa pelaku UMKM di kota Pematangsiantar yang menggunakan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) untuk sistem pembayarannya. Selanjutnya peneliti ingin menganalisis sejauh mana manfaat dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) Pada Sektor UMKM di Kota Pematangsiantar.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar dalam menggunakan QRIS?
2. Adakah manfaat dalam menggunakan QRIS terhadap pelaku UMKM?
3. Bagaimana hambatan pelaku UMKM di kota Pematangsiantar dalam penggunaan QRIS?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengetahuan pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar dalam menggunakan QRIS.
2. Untuk mengetahui manfaat dalam menggunakan QRIS terhadap pelaku

---

<sup>11</sup>Diakses dari [medan.tribunnews.com](http://medan.tribunnews.com) pada tanggal 16April 2021 pukul 13.00 wib.

UMKM.

3. Untuk mengetahui hambatan pelaku UMKM di kota Pematangsiantar dalam penggunaan QRIS.

Kegunaan Penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam implementasi sistem pembayaran QRIS pada sektor UMKM di Kota Pematangsiantar.

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan motivasi untuk mengembangkan penelitian berikutnya serta sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Praktisi

Dapat memberikan bahan informasi dan referensi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mahasiswa dan para pembaca dapat membantu pihak berkepentingan. Menambah pengetahuan dan memperkaya ilmu ekonomi terutama mengenai implementasi sistem pembayaran QRIS pada UMKM di kota Pematangsiantar.

4. Bagi Pedagang

Sebagai bahan edukasi kepada para pedagang UMKM untuk turut meningkatkan penggunaan metode pembayaran QRIS. Agar mempercepat dan mempermudah transaksi dan lebih efektif.

#### **D. Batasan Istilah**

Agar penulisan karya tulis ini tidak menyimpang dari pembahasan, batasan istilah penelitian ini adalah:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengapai suatu tujuan biasanya disebut sebagai implementasi.

2. Sistem pembayaran adalah kumpulan aturan, organisasi, dan metode yang mengatur proses pemindahan/transfer dana untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari kegiatan ekonomi.
3. QRIS merupakan kode QR yang dijadikan sebagai standart dan pemersatu untuk pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk setiap pembayaran atau transaksi menggunakan sistem *server based* yang ada dan terdaftar di Bank Indonesia seperti dompet digital dan uang elektronik .
4. Uang Elektronik adalah suatu jenis pembayaran yang nilai uangnya di simpan secara elektronik pada komputer atau kartu, dan proses penggunaan serta pengeluarannya dikendalikan dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia.
5. Badan usaha yang perbedaan dalam hal pendapatan, omset, lahan yang diatur berdasarkan undang-undang disebut sebagai UMKM. .

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Sistem Pembayaran**

###### **a. Pengertian Sistem Pembayaran**

Suatu substansi atau elemen yang digabungkan dengan cara tentu dan berkerjasama sehingga membentuk kesatuan untuk menjalankan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan disebut sebagai sistem.<sup>1</sup>

Secara terminologi, sistem ini digunakan oleh pengguna dalam banyak hal untuk merangkum, menyederhanakan dan meringkas suatu hal yang sebelumnya sangat sulit diartikan menjadi suatu yang lebih sederhana untuk mengapai suatu tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem merupakan suatu cara atau metode yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu atau kumpulan komponen yang berkerjasama untuk melakukan sesuatu.

Pembayaran adalah suatu perpindahan nilai dari pihak satu ke pihak kedua, dalam hal ini pihak pertama disebut sebagai penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli dan pada saat terjadi perpindahan nilai maka terjadi juga perpindahan jasa atau barang yang diinginkan oleh pembeli dan proses perpindahan itu disebut sebagai proses pembayaran.<sup>2</sup>

Sistem pembayaran adalah istilah yang mengacu pada sistem yang berkaitan dengan tindakan pemindahan uang tunai dari satu pihak ke pihak lain. Ini mencakup berbagai komponen, termasuk instrumen pembayaran, kliring, dan setelmen.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah operasi rutin berbagai komponen dalam rangka transfer nilai antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi. Menurut lembaga

---

<sup>1</sup>Muslim Hasbiyalloh dan Ahmad Jakaria, Aplikasi Penjualan Barang Pelengkapan Hand Phone di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, *Jumantaka*, vol 1, No. 1, 2018, h. 63.

<sup>2</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran (Strategi dan Implementasi di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet 2, 2013), h. 70.

<sup>3</sup> Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, (Bank Indonesia, 2008), h. 2.

internasional penerbit standart *best practice* dalam pengelolaan sistem, pembayarann yaitu *Committee for payment and settlement systems/bank for international settlement (CPSS/BIS)*, Sistem pembayaran didefinisikan sebagai interaksi antara entitas yang terdiri dari kumpulan instrumen, proses, dan sistem IFT, yang semuanya berkontribusi pada kelancaran arus kas.

*“A payment system consists of set of instruments, banking procedures and, typically, interbank funds transfer system that ensure the circulation of money”.*

Bruce Summer juga memberikan penambahan regulasi dan entitas lembaga dalam sebuah definsi sistem pembayaran.

*“The payment system, which consists of the laws, institutions, and technological processes that govern the movement of money, is a vital aspect of any monetary system and is particularly critical in a market economy.”*

"Sistem pembayaran terdiri dari hukum, institusi, dan proses teknologi yang mengatur pergerakan uang, merupakan aspek vital dari sistem moneter apa pun dan sangat penting dalam ekonomi pasar."

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mendefinisikan sistem pembayaran sebagai komponen yang melekat pada seperangkat undang-undang, lembaga, dan tata cara pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari kegiatan ekonomi.

*“Suatu sistem yang terdiri dari kumpulan peraturan, organisasi, dan proses untuk mentransfer uang untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari kegiatan ekonomi.”*

Aulia Pohan mendefinisikan sistem pembayaran sebagai sistem yang mengatur fasilitas operasional, kontrak dan proses teknologi yang digunakan untuk mengirim, mengesahkan, serta menerima instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang timbul dari pertukaran "nilai" antara orang-orang.<sup>4</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, terlihat jelas bahwa Sistem Pembayaran memiliki jangkauan yang cukup luas dan juga membutuhkan banyak komponen yang diawali dengan apapun yang berkaitan dengan pembayaran seperti alat

---

<sup>4</sup>Aulia Pohan, Sistem Pembayaran..., h. 71.



pembayaran, prosedur perbankan hingga sistem stransfer antarbank yang digunakan dalam proses pembayaran. Salah satu contoh dalam alat pembayaran yang cukup banyak yaitu e-money, kartu ATM, wesel-wesel, giro, bilyet,cek, kartu kredit, dan *electronic funds transfer*.

#### **b. Sejarah Sistem Pembayaran**

Penduduk di suatu wilayah kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pada awalnya, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka berburu ketika mereka lapar dan membuat pakaian mereka sendiri dari sumber daya yang ada disekitarnya, mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri, membuat perlengkapan dari berbagai benda yang ada di sekelilingnya seperti kapak dari batu, pisau dari tulang dan lain sebagainya. Singkatnya, apa yang ada disekitarnya, itulah yang di dimanfaatkan.

Namun, pada perkembangannya selanjutnya, manusia selalu menghadapi kelangkaan sumber daya di suatu tempat tertentu. Mereka yang tinggal di puncak gunung kekurangan bahan yang diperlukan untuk membuat garam. Di sisi lain, warga pesisir tidak mampu menghasilkan kopi atau gula yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Karena kelangkaan sumber daya ini, setiap manusia terpaksa mencari orang lain yang memiliki barang-barang yang mereka butuhkan dan bersedia menukarkan produk yang mereka miliki. Mereka menukar komoditas yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan masing-masing. Akibatnya, transaksi pertukaran yang dikenal dengan barter mulai terjadi. Hal-hal tertentu diperdagangkan dengan imbalan berupa pertukaran barang dengan jenis lain.

Transaksi terjadi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan komoditas yang dipertukarkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Seliter beras ditukar dengan sekantong garam. Sekilo ikan asin ditukar dengan sepuluh ikat sayuran. Sekantong kopi bubuk ditukar dengan sekantong ikan basah. Pertukaran bisa terjadi antara barang yang satu dengan yang lain ,tanpa ketentuan. Semuanya tergantung kebutuhan, dan tentu, kesepakatan.

Mempertahankan individu-individu yang saling membutuhkan pada saat yang sama, di sisi lain, bukanlah tugas yang mudah. Hal ini menjadi permasalahan

pertama dalam transaksi barter. Masalah lainnya adalah mendapatkan barang yang dapat ditukar dengan nilai tukar yang seimbang atau hampir seimbang. Tidak ada nilai standar yang disepakati secara universal; itu semua tergantung kesepakatan para pihak yang berdagang. Nilai sekilo garam tidak bisa ditentukan berapa. Kadang ia setara dengan sekilo beras, kadang dengan seikat sayur. Padahal sekilo beras tidak otomatis setara dengan seikat sayur. Begitulah, pertukaran tidak berlangsung standar. Lagi pula sangat sukar menghitung harga suatu barang dan barang lain yang dipertukarkan pada saat tertentu. Pertukaran sangat berdimensi sosial.

Untuk menghindari hal ini, konsep penggunaan objek tertentu dalam transaksi perdagangan mulai muncul. Ini sebagian besar adalah benda yang diterima secara luas, atau benda-benda tidak biasa yang dianggap memiliki nilai dan arti penting, atau benda-benda yang dibutuhkan setiap hari.

Garam digunakan sebagai alat perdagangan oleh orang Romawi untuk barang dan tenaga kerja. Kebiasaan ini bertahan untuk jangka waktu yang lama dan memiliki pengaruh yang signifikan. Salah satunya adalah kata bahasa Inggris untuk gaji, gaji berasal dari kata Latin *salarium*, yang berarti garam. Selain garam, benda-benda yang dianggap indah dan berharga, seperti kerang, digunakan sebagai alat tukar sebelum manusia membentuk uang.

Namun, keberadaan barang-barang tersebut tidak berarti bahwa tantangan dan transaksi tertentu dihilangkan. Ketika transaksi yang lebih kecil diperlukan tetapi barang yang ditukar tidak tersedia dalam bentuk pecahan, masalah lain terjadi. Belum lagi daya tahan exchanger yang tergolong pendek. Akibatnya, benda tukar tidak dapat disimpan dan akibatnya nilainya diturunkan. Masalah-masalah ini kemudian memotivasi individu untuk merancang cara perdagangan lain satu demi satu. Kemudian lahirlah koin sebagai alat tukar. Sejak saat itu, sistem pembayaran terus berkembang.

Terlepas dari batasan yang jelas, barter terus ada hingga saat ini, karena mesin ATM telah tersebar ke sudut-sudut mal, persimpangan jalan, dan ruang publik. Misalnya, warga di pedesaan masih terbiasa menukarkan satu liter nasi dengan lauk pauk yang ditawarkan oleh pedagang keliling. Pedagang keliling

akan mendapatkan uang dengan menjual biji-bijian yang dibarter. Selain itu, beberapa suku terpencil masih mengandalkan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inovasi transaksi terbaru juga tidak dapat menghapus secara penuh semua metode pembayaran yang telah ada sebelumnya, seperti berikut:<sup>5</sup>

#### 1. *Full Bodied Money*

Uang koin logam menandai era baru dalam sistem pembayaran. Logam memiliki nilai yang relative lebih tinggi dibandingkan jenis benda lainnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa logam dipilih sebagai media perdagangan yang diterima secara luas, kokoh, mudah ditransmisikan, dan dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Secara historis, logam yang paling banyak digunakan adalah besi dan tembaga. Dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknis pada masa itu, fungsi koin besi dan tembaga akhirnya digantikan oleh koin perak dan emas, yang dianggap lebih tahan lama dan relatif lebih stabil nilainya.

Uang penuh (*full bodied money*) adalah jenis uang logam yang berasal dari bahan perak dan emas, istilah uang penuh diberikan karena nilai. Istilah "uang penuh" mengacu pada situasi di mana nilai yang melekat (materi) dari uang (emas dan logam perak) hampir sama dengan nilai yang dinyatakan pada uang (nilai nominal). Jadi, nilai uang itu sama dengan nilai logamnya.

Jika tidak digunakan sebagai alat tukar, pemegang uang logam bisa saja menempa uang tersebut, misalnya dengan melebur, atau memakainya untuk berbagai keperluan. Artinya, bahan logam tersebut memang memiliki nilai dan kegunaan tersendiri. Fakta ini sering mengakibatkan komplikasi. Seringkali, jumlah uang beredar berkurang ketika koin perak dan emas dilebur untuk berbagai keperluan oleh pemiliknya atau ada juga yang menjadikannya sebagai barang simpanan. Akibatnya, sering kali timbul masalah manakala permintaan terhadap uang tinggi. Ciri utama uang bertubuh penuh adalah kesamaan nilai suatu barang ketika diubah menjadi komoditas atau ketika digunakan sebagai uang. Penawaran dan permintaan berperan dalam menentukan kesamaan harga.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 50.

Jika koin emas dianggap lebih berharga sebagai komoditas daripada uang, dapat dipastikan bahwa sirkulasi logam emas sebagai alat tukar akan semakin berkurang dan mereka akan dicairkan untuk digunakan sebagai komoditas melalui mekanisme pasar. Peleburan akan berhenti ketika keseimbangan terbentuk antara penawaran dan permintaan emas sebagai alat pertukaran dan sebagai komoditas. Kekuatan penawaran dan permintaan akan memastikan bahwa nilai emas sebagai uang tetap hampir identik dengan nilai emas sebagai komoditas. Fakta ini berkontribusi pada pengembangan kepercayaan pada koin emas, yang meningkatkan penerimaan mereka sebagai media perdagangan hingga puncaknya pada saat itu.

Ketika penggunaan koin emas pada saat itu telah dirasa nyaman untuk digunakan maka muncul suatu permasalahan baru akibat tuntutan dan kebutuhan manusia yang sangat kompleks. Periode industrialisasi merupakan puncak dari penggunaan uang logam pada masa itu, dan hampir semua masyarakat di semua negara manju bergantung pada transaksi ekonomi untuk meningkatkan standart dalam hidup bermasyarakat.

Proses transaksi yang begitu cepat mempersulit penggunaan uang logam dalam jumlah yang besar. Koin yang berat dan ukurannya terlalu besar menjadi lebih sulit untuk digunakan sebagai alat perdagangan. Pertimbangan berapa banyak uang yang harus dibawa dan diserahkan kepada individu yang ingin membeli sebuah properti seperti rumah, sawah dan ladang. Kendala-kendala itu kemudian memunculkan ide-ide baru dalam bertransaksi. Dalam perkembangannya, diciptakan lah jenis uang kertas.

## 2. *Representive full bodied money*

*Representive full bodied money* adalah jenis cetak yang dapat mewakili nilai dari logam mulia.<sup>6</sup> Awalnya, uang kertas tidak digunakan untuk menggantikan logam dalam transaksi. Kertas tersebut terdiri dari catatan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas dan perak. Sebagai logam berharga, kepemilikan emas dan perak harus didukung dengan dokumentasi yang disediakan

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syaiah, ( Jakarta: Kencana, 2017), h. 5.

dalam bentuk lembaran kertas. Ketika emas dan perak dipertukarkan, dokumen tersebut berfungsi sebagai perantara.

Dengan kata lain, uang kertas yang beredar sepenuhnya didukung oleh emas dan perak yang dipegang, dan emas dan perak dapat ditukar setiap saat. Penggunaan “uang kertas” sudah ada sejak lama dan semakin berkembang hingga uang kertas yang beredar tidak ditopang oleh emas yang nilainya sama dengan nilai nominalnya. Selain itu, "kertas bukti" berfungsi sebagai media transaksi.

Pada awalnya, gagasan menciptakan uang kertas dengan nilai tetap yang dijamin dengan logam mulia berkembang. Uang kertas berfungsi sebagai bukti kepemilikan logam mulia, seperti emas atau perak. Era ini disebut sebagai era uang representasional bertubuh penuh. Sementara barang-barang yang dijamin disimpan dengan aman, uang kertas dapat ditukar sebagai alat perdagangan.

Bentuk uang ini diadopsi untuk pertama kalinya di Inggris abad ke-16. Itu adalah perusahaan swasta yang membuat Goldsmith menjadi pionir. Karena fakta bahwa uang kertas ini dapat diperdagangkan untuk sejumlah koin logam tertentu, uang kertas menjadi sama diterimanya dengan koin logam. Selain itu, uang jenis ini beredar di Amerika Serikat, yaitu dalam bentuk sertifikat emas. Pemilik dan pemegang sertifikat emas dapat menyerahkan sertifikat ke Departemen Keuangan AS untuk mendapatkan koin emas. Demikian pula, banyak sertifikat perak telah diterbitkan dan digunakan di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir.

### 3. *Credit Money*

Persyaratan dalam penjaminan uang kertas dengan emas setiap hari menjadi semakin tidak dibutuhkan mengingat meningkatnya permintaan publik akan metode pembayaran yang dapat dipercaya dan mudah digunakan. Selanjutnya yang terjadi adalah perkembangan uang dengan nilai yang lebih besar dari nilai intrinsiknya sebagai barang. Bahkan dalam kasus uang kertas, nilai intrinsik barang tersebut menjadi tidak penting. Ini disebut sebagai uang fiat atau kredit.

Menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dijadikan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang jenis ini dalam memenuhi tuntutan perekonomian. Saat ini, semua mata uang dan uang logam, termasuk

uang kertas dan uang logam yang beredar di Indonesia, adalah uang fiat atau uang kredit. Namun, hubungan antara peredaran uang dan cadangan emas tidak relevan.

Manfaat uang fiat atas uang bertubuh penuh adalah bahwa pemerintah menghemat uang untuk akuisisi uang. Secara alami, tabungan ini dapat digunakan untuk mendanai inisiatif sosial lain yang bermanfaat. Selain itu, jumlah uang beredar tidak lagi bergantung pada penemuan metode baru penambangan emas atau logam lainnya.

#### 4. Cek dan Saldo Giro

Penggunaan cek dan giro merupakan kemajuan yang signifikan dalam hal mengubah proses pembayaran. Evolusi mekanisme pembayaran ini terkait erat dengan pendirian lembaga perbankan. Bank yang secara historis berfungsi sebagai penyimpan uang mulai mengembangkan sistem pembayaran berdasarkan rekening giro publik. Pengeluaran cek memenuhi keinginan masyarakat akan metode pembayaran yang lebih efisien dalam jangka waktu yang lama. Proses penyelesaian transaksi itu sendiri mengharuskan penggunaan *clearinghouse*. Penghematan biaya transportasi pada saat transaksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan apabila pengguna menggunakan cek sebagai instrument pembayaran karena pengguna tidak perlu membawa sejumlah kotak uang tunai yang membutuhkan tempat dan juga biaya yang cukup banyak untuk menukarkan uang tunai tersebut kepada penjual.

Menempatkan uang dalam jumlah besar di rekening giro di lembaga keuangan jauh lebih aman daripada menyimpan uang di rekening perorangan, yang memerlukan lokasi penyimpanan terpisah dan berisiko hilang atau dicuri. Selain itu, akun menyimpan log transaksi sederhana yang mungkin bermanfaat untuk melacak dana. Semakin maju suatu perekonomian, semakin besar pula bagian masyarakat terhadap giro.

#### 5. Transaksi Elektronik

*Full-bodied money; fiat money* dan *checking accounts* (rekening giro) merupakan tiga jenis inovasi besar dalam instrument pembayarannya yang terjadi setelah lahirnya sistem barter dalam sebuah transaksi.

Secara umum, evolusi uang berpuncak pada penciptaan uang kertas. Karena penggunaan uang fiat atau uang tunai telah ada hingga saat ini. Namun, inovasi pembayaran terus berlanjut dalam literatur saat ini sebagai instrumen pembayaran generasi keempat, khususnya transaksi pembayaran elektronik atau yang dikenal sebagai sistem transfer dana elektronik nontunai. Data transaksi dan jaringan komunikasi dilindungi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti sirkuit terpadu (IC), enkripsi, atau kata sandi, dalam pembayaran elektronik.

Pada awalnya, transaksi elektronik digunakan untuk transfer intra-bank, terutama pada bank-bank besar dengan jaringan yang luas, sehingga diperlukan efisiensi dalam kegiatan pemindah bukuan. Transaksi elektronik secara bertahap menggantikan transaksi kertas antara bank dengan nasabahnya, khususnya nasabah korporasi yang menuntut volume besar dan frekuensi transaksi yang tinggi.

Kebutuhan ini mendorong terciptanya berbagai bisnis switching yang bergerak di bidang kliring dan penyelesaian transaksi antar bank. Sejak diperkenalkannya lembaga switching dan komponen terkait lainnya seperti sebagai penyedia jaringan komunikasi, penyedia infrastruktur ATM, dan lain-lain, penggunaan transfer uang elektronik tak terhindarkan meningkat.

Seiring dengan kebutuhan transfer keuangan, kemajuan dalam sistem pembayaran juga tidak kalah pesatnya. Kartu debit, misalnya, didorong untuk muncul sebagai alat pembayaran berbasis rekening pengguna karena teknologi informasi semakin terjangkau dan pemasok semakin banyak. Teller dapat digantikan dengan mesin ATM karena kemajuan teknologi. Hal ini menandai mulai meluasnya penggunaan instrumen kartu, khususnya kartu ATM yang dibiayai oleh rekening nasabah.

Transaksi elektronik, dalam berbagai bentuknya, terus meningkat popularitasnya. Selain transaksi diantara *klient* dengan bank, ini mencakup transaksi antara pelanggan dan bahkan transaksi antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dari hari ke hari, kegiatan transaksi elektronik terus meningkat memberi warna tersendiri pada sistem pembayaran di dunia saat ini.

### c. Jenis-jenis Sistem Pembayaran

Dari empat generasi pertumbuhan transaksi pembayaran, dimulai dengan *full-bodied money; fiat money; checking accounts* (rekening giro), terlihat adanya kecenderungan dari transaksi tunai menuju transaksi nontunai. Dalam kehidupan sehari-hari, ada dua metode pembayaran yang berbeda: pembayaran tunai dan non-tunai.

#### 1) Tunai (*cash*)

Uang, dalam bentuk koin dan uang kertas, dapat digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan instrumen pembayaran, untuk mempermudah transaksi di suatu negara biasanya negara tersebut akan membentuk sistem peredaran uang dengan banyak jenis uang pecahan. Salah satunya ialah mata uang Rupiah yang memiliki banyak jenis pecahan seperti pecahan seratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, lima ribu rupiah, dua ribu rupiah, seribu rupiah bahkan hingga pecahan satu rupiah.

Pecahan-pecahan uang rupiah yang berbentuk uang kertas memiliki nominal paling kecil yaitu seribu rupiah dan paling besar adalah seratus ribu rupiah dan untuk jenis uang logam yang paling kecil adalah satu rupiah sedangkan yang paling besar nominalnya adalah seribu rupiah.

Sementara transaksi nontunai meningkat, transaksi tunai menurun. Namun, banyak orang terus memilih transaksi tunai. Selain itu, transaksi non-tunai menyiratkan bahwa konsumen memiliki pemahaman teknologi yang baik. Dengan demikian, di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia, ketersediaan uang tunai masih menjadi faktor penting dalam Sistem Pembayaran. Signifikan kas, baik dari sisi ketersediaan, suplai, regulasi, maupun distribusi, memerlukan pembentukan lembaga yang kompeten. Bank sentral adalah entitas di banyak negara yang bertanggung jawab untuk mengelola jumlah uang beredar.

Tujuan utama kebijakan peredaran uang adalah untuk memasok uang masyarakat dengan jumlah nominal yang memadai, dalam pecahan yang tepat, tepat waktu, dan dalam kondisi yang ramah sirkulasi. Akibatnya, mata uang yang digunakan dalam transaksi harus mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu:



- a) Untuk mempermudah sistem transaksi pembayaran tunai yang bisa dipercaya dan diterima oleh masyarakat, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya lembaga pencetak uang tunai harus membuat ciri khusus dalam uang tunai, diantaranya :
1. *user friendly*/ nyaman dan mudah untuk digunakan.
  2. *Durable*/ uang dapat digunakan dalam jangkaw waktu yang lama.
  3. *Easily recognized*/ uang yang dikeluarkan harus mudah dikenali oleh masyarakat.
  4. *Secure against counterfeiting*/ untuk menghindari penipuan tidak boleh mudah dipalsukan.
- b) Dibutuhkan perencanaan dalam hal pengadaan dan distribusi uang tunai pecahan agar uang pecahan yang beredar sesuai dengan kebutuhan jenis uang pecahan yang di butuhkan oleh masyarakat.
- c) Demi mewujudkan kelancaran arus uang layak edar dalam skala regional maupun nasional dibutuhkan lembaga pendukung di setiap daerah.

Untuk menumbuhkan suasana seperti itu, sangat penting untuk terlibat dalam empat tugas manajemen kas strategis. Sebelum mengeluarkan uang baru, lakukan penyelidikan dan persiapan yang matang. Banyak yang percaya bahwa proses menghasilkan uang baru itu mudah. Yang diperlukan hanyalah membuat gambar, mendapatkan persetujuan dari individu atau ahli waris yang gambarnya akan ditampilkan pada uang, dan kemudian dilanjutkan dengan pencetakan uang. Sebenarnya, itu tidak begitu mudah. Selain memilih gambar dan mempercayai realitasnya, tidak ada sumber daya sederhana yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Untuk mengembangkan bahan yang tahan lama, diperlukan penelitian lebih lanjut. Lalu, bagaimana memilih elemen keamanan yang sesuai. Belum lagi pemilihan proses pencetakan yang tepat untuk memastikan bahwa hasil cetakan sesuai dengan peralatan yang biasa digunakan seperti mesin sortir, ATM, dan kemasan.

*Kedua*, kebijakan persediaan uang yang digunakan untuk selalu menjaga ketersediaan dan kecukupan jumlah uang dalam berbagai bentuk pecahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penarikan uang dan persediaan uang layak edar. Kebijakan ini juga harus memperhatikan keakuratan dalam proses cetak uang, distribusi yang memadai dan juga berkaitan dengan tingkat layak edar yang dapat dimaklumi.

*Ketiga*, membuat kebijakan yang efektif dalam sistem distribusi uang. terkait dengan pemilihan sistem distribusi uang yang efektif. Perencanaan yang matang diperlukan untuk menjamin tersedianya persediaan uang yang memadai, lancar, dan tepat waktu. Pertimbangan harus diberikan pada kemudahan mobilitas dan kemanjuran kantor seperti Depot Tunai dalam menjalankan tugasnya.

*Terakhir* yaitu dalam membantu Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas pengedaran uang pecahan rupiah, Bank Indonesia juga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak salah satunya adalah lembaga perbankan yang ada di daerah-daerah.

Bank Indonesia merupakan bank sentral dan juga lembaga yang membuat kebijakan terkait peredaran uang, dan untuk mengetahui aliran uang masuk/ *inflow*, aliran uang yang keluar/ *outflow* dari angka uang karta yang diedarkan (UYD).

Menurut angka Bank Indonesia, rata-rata pertumbuhan tahunan UYD, *inflow*, dan *outflow* masing-masing tumbuh 10,25 persen, 16,33 persen, dan 14,95 persen, selama periode enam tahun, dari tahun 2000 hingga 2005. Namun, sesuai dengan meningkatnya penggunaan alat pembayaran nontunai, kenaikan dari tahun ke tahun ini mencerminkan pola pertumbuhan variabel yang cenderung turun.

## 2) Nontunai

*Credit transfer* dan *debit transfer* merupakan dua jenis instrument pembayaran non tunai. Perbedaan keduanya terdapat dalam sistem perintah pengiriman uang. Sesuai terminologi yang dibuat oleh *Bank for International Settlement* (BIS), *credit transfer* merupakan perintah pembayaran yang digunakan untuk memindahkan dana dari pengirim ke penerima melalui transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima, terkadang melalui bank perantara.

Sedangkan *debit transfer* artinya metode transfer dana di mana pihak yang memiliki dana dan akan membuat draft transfer atau mengotorisasi perintah transfer. Perintah transfer ditransmisikan ke pihak yang menerima uang tunai untuk distribusi selanjutnya. Setelah itu, bank menyelesaikan perintah transfer debit dengan lembaga kliring, memungkinkan bank penerima untuk menagih uang ke bank pengirim. Cek, bilyet giro, dan nota debit merupakan alat pembayaran yang digunakan saat ini.

Ragam dari kedua jenis transfer ini bermacam-macam. Ada yang berbasis kertas (*paper based*), kartu (*card based*), dan elektronik (*electronic based*).

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Contoh Alat Pembayaran**

<i>Credit Transfer</i>			Debit Transfer
<i>Paper Based</i>	<i>Card Based</i>	<i>Electronic Based</i>	<i>Paper Based</i>
Dulu ada nota kredit (Sebelum diterapkan SKBN)	- Kartu ATM - Kartu ATM dan Debit - Kartu Kredit - Kartu Prabayar( <i>e-money</i> )	- Transfer Kredit Via RTGS dan SKNBI - <i>Server based e-money</i>	- Cek - BG - Nota Debit lain

Sistem pembayaran nontunai berkembang dari instrumen berbentuk kertas seperti cek, bilyet giro, dan warkat lainnya. Karena bank telah mempromosikan penggunaan sistem elektronik dan alat pembayaran berbasis kartu dalam semua manifestasinya, ekspansi alat pembayaran berbasis kertas terus melambat. Apalagi sekarang mekanisme elektronik seperti transfer dan kliring sudah banyak digunakan.

Selain itu, bentuk uang elektronik menggunakan kartu seperti kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit merupakan instrument pembayaran berbentuk kartu yang berkembang karena adanya kemajuan teknologi. Ada beberapa bentuk alat pembayaran nontunai yang tersedia saat ini, antara lain sebagai berikut:

a) Cek dan Bilyet Giro

Alat pembayaran nontunai seperti cek dan bilyet giro telah digunakan masyarakat untuk bertransaksi sejak lama. Meskipun mekanisme pembayaran dengan kartu yang lebih praktis dan efektif telah berkembang selama lima tahun terakhir, tampaknya beberapa elemen masyarakat tetap menyukai cek dan bilyet.

Hal ini terlihat dengan meningkatnya penggunaan cek dan bilyet giro. Di Indonesia, misalnya, penggunaan cek dan bilyet giro tumbuh sebesar 6,1 persen antara 2007 dan 2008. Jumlah transaksi tumbuh dari 39 juta menjadi 42 juta. Nilainya juga meningkat 23,9 persen, dari Rp900 triliun menjadi Rp1.200 triliun.

Cek tersebut mewakili 12,4 persen dari total ini. Sisanya adalah Bilyet Giro. Dalam hal pertumbuhan, cek melampaui Bilyet Giro. Jumlah cek yang disetujui mencapai 3,6 juta transaksi senilai Rp153,7 triliun, naik 8,8 persen dari sisi volume dan 25,1 persen dari sisi nilai (value). Sementara dari sisi Bilyet Giro, volume yang dikliring mencapai 38,2 juta transaksi senilai Rp1.077,9 triliun, naik 5,9 persen volume dan nominal gain 23,9 persen.

b) *Kartu Kredit*

Kredit bank digunakan sebagai salah satu jenis transaksi nontunai yang disebut sebagai kartu kredit. Bentuk instrumen transaksi ini semakin populer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kartu kredit mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an. Kelas menengah ke atas sering menjadi pemilik kartu kredit. Seiring dengan pendapatan yang signifikan, sektor pengguna terdiri dari kelas atas, di mana bahaya default diyakini rendah. Hal ini menggelitik perhatian bank-bank lain dalam memasuki sektor kartu kredit.

Pasar kartu kredit sedang booming, begitu pula dengan banyaknya institusi yang telah merambah ke penerbit kartu kredit. Bank-bank yang sebelumnya tidak terlibat dalam kredit konsumen mulai memasuki sektor kartu kredit. Daya pikat margin keuntungan yang besar, meski digunakan untuk memitigasi risiko yang sangat tinggi, namun tidak menyurutkan minat bank untuk menjadi penerbit kartu kredit. Bahkan bank-bank yang mengkhususkan diri dalam perbankan korporasi atau pinjaman untuk usaha kecil dan menengah mulai mencari cara untuk meningkatkan proporsi pinjaman ritel, terutama pinjaman konsumen.

Desakan perbankan untuk masuk ke sektor kartu kredit antara lain dilatarbelakangi oleh peluang perkembangan kartu kredit di Indonesia. Salah satu cara untuk mengetahui potensi pasar adalah dengan membandingkan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif dengan jumlah pemegang kartu kredit.

Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia berpenduduk 230 juta jiwa, dengan 127 juta jiwa berada pada usia produktif (usia 20-50 tahun). Sementara jumlah kartu kredit yang diterbitkan mencapai 11,5 juta pada Desember 2008. Jika setiap individu memiliki dua kartu kredit, jumlah pemegang kartu kredit di Indonesia saat ini hanya 4,5 persen dari potensi pasar yang ada (jumlah penduduk usia produktif). Dalam hal ini, pasar Indonesia tidak diragukan lagi masih menarik bagi perusahaan kartu kredit.

Pertumbuhan kartu kredit juga didorong oleh variabel lain seperti gaya hidup dan ekspektasi transaksional akan kemudahan dan kenyamanan. Kesan pemegang kartu kredit sebagai status yang tinggi juga memotivasi individu untuk mendapatkan uang plastik ini. Tren gaya hidup uang pinjaman mendorong penggunaan kartu kredit di berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, upaya pemasaran yang agresif dan godaan hadiah atau promosi untuk pemegang kartu kredit baru, semuanya berkontribusi signifikan terhadap penerimaan masyarakat terhadap kartu kredit sebagai mekanisme pembayaran alternatif.

Ekspansi kartu kredit yang pesat tercermin dari peningkatan jumlah kartu yang beredar setiap tahunnya. Pada tahun 2003, jumlah kartu baru sekitar 4,5 juta; pada tahun 2008, telah meningkat menjadi 11,5 juta, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 20,8 persen. Meningkatnya popularitas kartu-kartu ini selama lima tahun terakhir juga berkontribusi pada peningkatan penggunaannya. Peningkatan volume tahunan mencapai 20,7 persen, sedangkan pertumbuhan nilai tahunan mencapai 30,5 persen.

c) *Account Based Card* (Kartu ATM dan Debet)

Metode pembayaran yang mengambil dana dari rekening nasabah menggunakan kartu disebut sebagai *Account Based Card*. Kartu ATM, Kartu Debit, atau campuran Kartu ATM dan Kartu Debit termasuk dalam kategori ini.

Pada awal perkembangannya, jenis kartu berbasis rekening yang paling banyak digunakan hanyalah kartu ATM. Hal ini karena tujuan teknologi ATM yang dimaksudkan adalah sebagai pengganti peran teller untuk mengurangi biaya overhead yang terkait dengan perluasan cabang dan peningkatan penggunaan sumber daya manusia. Pada saat itu, fungsinya terbatas pada penarikan tunai, cek saldo, dan transfer antar rekening yang dimiliki oleh bank yang sama.

Infrastruktur jaringan ATM secara progresif digunakan dalam pertumbuhannya. Bank dengan fondasi teknologi yang agak matang telah mempelajari pembuatan kartu debit sambil juga mendirikan perusahaan untuk mengelola infrastruktur pengalihan transfer dana antar bank. Mulai bermunculan bank-bank yang menawarkan cara pembayaran di pengecer dengan menggunakan kartu ATM yang merangkap sebagai kartu debit.

Sejak berkembangnya berbagai penyedia layanan switching, penggunaan kartu debit semakin luas. Bank dengan sejumlah kecil mesin ATM dapat berkolaborasi untuk berbagi infrastruktur mereka dan dimasukkan ke dalam jaringan antar bank perusahaan switching. Manfaat sinergi ini antara lain penghematan biaya dan peningkatan citra bagi bank yang dapat menyediakan kartu debit dan peningkatan fungsionalitas ATM, khususnya untuk fasilitas transfer tunai dan pembayaran di berbagai bisnis.

Pertumbuhan kartu berbasis rekening kembali meningkat seiring dengan semakin banyaknya bank pengakuisisi (emiten) yang menyediakan infrastruktur Electronic Data Capture (EDC), termasuk perangkat pembaca kartu debit di lokasi merchant. Inovasi ini berkontribusi pada kartu berbasis akun yang memiliki tingkat pertumbuhan tercepat dari semua instrumen pembayaran.

Tiga faktor berkontribusi pada peningkatan lebih cepat dari kartu berbasis rekening daripada instrumen pembayaran lainnya:

1. Jumlah penabung meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.
2. Berbagai fitur dan keuntungan yang lebih luas tersedia bagi pemegang kartu. Mesin ATM, yang awalnya dirancang untuk menggantikan teller, saat ini memfasilitasi perpindahan uang tunai antar rekening dan

bahkan antar bank, serta pembayaran untuk berbagai kebutuhan dasar seperti telepon, energi, air, dan kartu kredit.

3. Fungsi kartu berbasis akun untuk pembayaran pedagang berkembang.

d) *Uang* Elektronik

Meskipun uang elektronik masih dalam masa perkembangan, ia memiliki kehadiran yang signifikan di masyarakat. Sejak diluncurkan pada April 2007, lebih dari satu setengah tahun yang lalu, uang elektronik telah berkembang menjadi 430.000. Berbeda dengan ketika uang elektronik pertama kali muncul, saat ini dikeluarkan tidak hanya melalui *chip* yang ditanamkan pada kartu atau media lain (berbasis *chip*), tetapi juga menggunakan media lain, terutama media yang terlebih dahulu harus dihubungkan dengan server penerbit sebelum digunakan untuk keperluan transaksi (berbasis *server*). Demikian pula, hampir semua uang elektronik yang diterbitkan saat ini bersifat multiguna, sehingga dapat diterima di berbagai pengecer.

Ada sekitar 2,5 juta transaksi uang elektronik dengan nilai transaksi sebesar \$76,7 miliar terjadi pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam transaksi elektronik di banding tahun sebelumnya baik dalam jumlah transaksinya yang meningkat sekitar 77,1% dan maupun dalam besaran nilai transaksinya yaitu sebesar 93,1%. Dengan semakin banyaknya penerbit uang elektronik, transaksi alat pembayaran tersebut berkembang pesat. Sembilan penerbit uang elektronik pada akhir tahun 2008 telah disahkan. Kami berharap tren ini terus berlanjut, karena peningkatan penggunaan uang elektronik mengurangi kebutuhan transaksi tunai. Dalam skala yang lebih besar, meluasnya penggunaan uang elektronik diperkirakan akan meringankan biaya transaksi ritel, terutama yang terkait dengan penanganan tunai.

Uang elektronik juga cukup mudah diperoleh dan digunakan sebagai alat pembayaran. Pengguna hanya perlu mengirimkan sejumlah uang kepada lembaga penerbit, dan di media uang elektronik, nilai uang tersebut dicatat secara digital. Untuk kartu berbasis chip, pembawa dapat melakukan transaksi secara offline menggunakan uang elektronik (berupa kartu atau bentuk lainnya). Selama sistem

berbasis server, pemegang akan diberikan kemampuan untuk mengakses "akun virtual" melalui ponsel (sms), kartu akses, atau cara lain, yang memungkinkan pemrosesan transaksi online. Transaksi uang elektronik, terutama yang ditangani secara *off-line* dengan cepat, memakan waktu sekitar 2 hingga 4 detik. Karena uang elektronik bertujuan sebagai bentuk pembayaran bernilai rendah, maka nominal satu juta rupiah merupakan batas uang yang dapat disimpan dalam aplikasi uang digital saat ini. Namun, pembatasan ini dapat diubah di masa mendatang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan industri. Apabila pemegang kehilangan minat untuk menggunakan uang jenis ini atau bahkan ingin berhenti menggunakannya, maka nilai uang dalam uang elektronik dapat diambil (penarikan nilai uang secara lengkap pada media uang elektronik) sesuai dengan proses yang ditetapkan oleh masing-masing penyedia layanan jasa keuangan.

e) QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*)

QRIS atau yang dibaca kris adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standard*. Sesuai dengan namanya, QRIS adalah suatu upaya standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Pengembangan QRIS ini mengusung semangat UNGGUL, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Universal: seluruh lapisan masyarakat baik dalam maupun luar negeri dapat menggunakan QRIS untuk bertransaksi.
- 2) GampanG: mudah, aman dan dalam satu genggam dalam bertransaksi secara nontunai
- 3) Untung: Efisien, satu *code* QR untuk seluruh aplikasi
- 4) Langsung: kelancaran sistem pembayaran yang menyebabkan transaksi ini menjadi lebih cepat diterima.

Mulai 1 Januari 2020, seluruh Penyelenggara layanan pembayaran (PJSP) diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk mengadopsi sistem pembayaran menggunakan QRIS sebagai pemersatu seluruh aplikasi pembayaran yang menggunakan QR Code. Kemudian, QRIS dapat dimanfaatkan oleh merchant

---

<sup>7</sup>Diakses dari <https://www.bi.go.id> pada tanggal 21 April 2021 pukul 20.00 WIB.



yang memiliki hubungan dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Karena sistem QR Code ini beroperasi dalam *Merchant Presented Mode* (MPM). Pengguna hanya perlu memindai QR Code pada perangkat QRIS mereka di merchant-merchant yang berpartisipasi yang mendukung transaksi QR. Merchant yang menerima antara lain LinkAja, Gopay, OVO, DANA, dan Bukalapak. Cukup menggunakan satu Kode QR terintegrasi. Dengan demikian, transaksi dapat diselesaikan terlepas dari aplikasi pembayaran QR yang digunakan oleh pengguna. Batasan transaksi yang diizinkan berdasarkan pedoman penerapan QRIS adalah Rp 2.000.000 per transaksi. Namun demikian, Penerbit (PJSP) dapat menetapkan batasan nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna QRIS. Praktik manajemen risiko emiten diperhitungkan dalam menentukan nominal kumulatif. Penerapan QRIS merupakan salah satu tujuan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Dengan QRIS diharapkan transaksi pembayaran menjadi lebih efisien atau sederhana, inklusi keuangan di Indonesia akan meningkat, dan UMKM akan menjadi lebih canggih, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup>

a. Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS

1. *Merchant Presented Mode*

Teknik yang digunakan dalam jenis ini adalah merchant menyediakan QR Code dan ketika pelanggan melakukan pembelian maka pelanggan harus melakukan scan Code QR yang disediakan oleh merchant. Terdapat 2 bentuk QR Code *Merchant Presented Mode*:

1) Statis

Karakteristik:

- a) *Print-Out* Stiker QRIS menampilkan *ID Merchant* dengan kode QR yang bersifat tetap
- b) Pelanggan dapat memasukkan jumlah nominal transaksi di aplikasi pembayaran digital yang ada pada *smartphone* pelanggan.

---

<sup>8</sup>Bank Indonesia, "Setelah Bunga Acuan Turun, Masih Ribet dengan Banyak QR Code?," dalam majalah Bank Indonesia Bicara (2019), h. 3.

## 2) Dinamis

### Karakteristik

- a) Mesin EDC akan menghasilkan struk pembayaran dengan kode QR dan menampilkan nominal pembayaran di monitor.
- b) Setiap transaksi diidentifikasi oleh kode QR yang unik
- c) Dalam Kode QR nominal transaksi juga ada di dalamnya.

## 2. *Customer Presented Mode*

Setiap orang dapat menggunakan *Code Customer Presented Mode* dan untuk mekanisme dapat dilakukan dengan cara pelanggan dapat memilih dan mengunduh berbagai aplikasi pembayaran digital melalui ponsel pintar, kemudian pastikan aplikasi tersebut memiliki saldo yang cukup dan yang terakhir pemilik merchant akan melakukan scan code QR yang ditampilkan melalui ponsel pintar pelanggan menggunakan mesin yang telah tersedia.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan transaksi menggunakan QRIS adalah memiliki smartphone yang terkoneksi dengan internet, aplikasi pembayaran digital serta saldo yang mencukupi nilai transaksi di aplikasi pembayaran digital.

### 1) Cara Transaksi Sebelum QRIS

Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada Merchant.

### 2) Cara Transaksi Setelah QRIS,

Merchant tidak perlu lagi menyiapkan beberapa aplikasi pembayaran; mereka hanya perlu menunjukkan satu QR Code di toko, yang dapat dibaca oleh konsumen menggunakan berbagai program pembayaran di *smartphone* mereka.



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

**Gambar 2.1** Gambaran sebelum dan sesudah  
*merchant* menggunakan QRIS

#### **d. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran**

Sistem Pembayaran ada sebagai hasil dari evolusi kebutuhan transaksional manusia. Inovasi transaksi pembayaran membutuhkan sistem pendukung transaksi agar dapat berfungsi dengan baik. Sistem Pembayaran tidak beroperasi secara terpisah. Hal ini terkait erat dengan sistem moneter, stabilitas keuangan, perbankan, dan ekonomi, serta memiliki ikatan budaya yang mendalam.

Oleh karena itu, agar transaksi pembayaran dapat berjalan dengan lancar, semua komponen harus menjalankan fungsinya dengan baik dan bekerja sama satu sama lain. Seperti halnya orkestra, setiap komponen harus berfungsi dengan baik. Akibatnya, kami membutuhkan konduktor yang benar-benar tahu bagaimana musik dimainkan. Demikian pula, Sistem Pembayaran harus diatur oleh entitas tersendiri yang akan mengawasi bagaimana sistem beroperasi secara optimal. Dan di banyak negara, seperti Indonesia, bank sentral bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan sistem pembayaran.

Kebijakan Sistem Pembayaran biasanya ditentukan sesuai dengan konsep dasar yang diakui secara umum. Entitas yang mengelola sistem pembayaran setidaknya mematuhi empat prinsip dasar. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pertama, melakukan penguurangan resiko.. Sistem pembayaran yang terkontrol dengan baik akan mampu mengurangi beberapa

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 72.

bahaya. Sebagai sebuah sistem, sistem pembayaran juga memiliki resiko diantaranya seperti: risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik adalah contohnya.

2. Kedua, mencari cara agar dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat sangat diperlukan untuk membangun perekonomian yang efektif. Sementara itu, perbankan dan sistem keuangan yang efektif tidak mungkin dapat dicapai tanpa bantuan terciptanya Sistem Pembayaran yang efisien, karena Sistem Pembayaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan semua kegiatan keuangan dan perbankan secara nasional.
3. Kesetaraan adalah prinsip ketiga. Memberikan akses yang merata kepada pengguna baik yang tergabung dalam Sistem Pembayaran maupun anggota komunitas yang lebih luas. Apabila operasional dan pengaturan dalam sistem pembayaran tidak mampu memenuhi dan melindungi hak-hak pengguna sistem pembayaran maka dapat dikatakan sistem tersebut belum sesuai dengan standart atau tidak sesuai dengan kualifikasi.
4. Perlindungan konsumen merupakan prinsip keempat. Sistem pembayaran harus mampu menjamin masyarakat luas memiliki akses terhadap layanan sistem pembayaran yang aman cepat dan andal.

#### **e. Sistem Pembayaran Menurut Perspektif Islam**

Seiring berjalannya waktu, metode pembayaran dengan uang telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih praktis yang tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk kode digital yang disimpan di server, kartu chip, atau smartphone seseorang. Ini disebut sebagai uang elektronik (*e-money*) atau mata uang digital (*digital currency*).

Islam memandang uang elektronik, akibat dari fenomena sosial modern, adalah legal atau boleh, karena sebenarnya segala sesuatu dalam muamalah



<sup>10</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, “*E-Money* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, h. 152-153.

<sup>11</sup>Q.S. An-Nisa’/4:29.

<sup>12</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an*, (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 252.

## الثابت بالعرف كالثابت بالشرعي

Artinya:

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan *syara* (selama tidak bertentangan dengan syariah)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik yang menyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Uang elektronik adalah cara pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Dikeluarkan berdasarkan jumlah uang yang ditempatkan di muka kepada penerbit;
  - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam media terdaftar;
  - c. Jumlah nominal uang elektronik yang ditangani oleh penerbit bukan merupakan titipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan.
  - d. Digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant yang bukan penerbit uang elektronik.
- 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang menganut aturan syariah.<sup>13</sup>

## 2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

### a. Pengertian UMKM

Di Indonesia, istilah "UMKM" didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut UUD 1945, yang kemudian diperkuat dengan TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Ekonomi Kerakyatan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diberdayakan sebagai bagian integral dari perekonomian rakyat dengan kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang,

---

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

dan berkeadilan. Selain itu, definisi UMKM ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan mengingat kondisi pertumbuhan yang dinamis, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil yang pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional, tidak memiliki legalitas hukum yang jelas sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada para pegawainya dan dalam skala pertumbuhan ekonomi nasional, usaha ini hanya memberikan efek kecil.<sup>14</sup>
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri dan dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bergabung dengan Usaha Menengah atau Besar yang memenuhi definisi dari Usaha Kecil. Standar komersial yang diatur dalam Undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi swadaya yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang lebih besar dan tidak dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan, penjualan bersih, atau penjualan tahunan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang.
- 4) Usaha Besar adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif tetapi memiliki kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan yang lebih besar daripada usaha Menengah, yang meliputi usaha milik negara atau swasta nasional, usaha patungan, dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Isnaini Harahap, "Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner" <http://repository.uinsu.ac.id/5797/1/EKONOMI%20PEMBANGUNAN.pdf>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 15.47.



- 5) Dunia Usaha terdiri dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia dan masih berada di Indonesia.<sup>15</sup>

**Tabel 2.2 Jumlah UMKM di Indonesia**

Tahun	Jumlah
2017	62.922.617
2018	64.194.057
2019	64.758.256

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,2020

### **b. Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang**

Pembahasan sebelumnya adalah pengertian usaha berdasarkan Undang-Undang (UU) dan pembahasan berikutnya adalah kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang, UU No. 20 Tahun 2008 telah mengatur jenis usaha bersarkan omset dan aset sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008**

<b>Kriteria Usaha</b>	<b>Aset</b>	<b>Omzet</b>
1. Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2. Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 miliar
3. Usaha Menengah	>500 juta – 10 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar

### **c. Klasifikasi UMKM**

Kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar perkembangannya adalah jenis kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Selain itu, kelompok ini telah menunjukkan ketahanan terhadap berbagai jenis guncangan yang terkait dengan krisis ekonomi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mendorong sektor UMKM yang mencakup beragam sektor dan usaha ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

<sup>15</sup> Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 1, Januari 2017, h. 54.

- 1) Kegiatan mata pencarian yang di lakukan oleh UMKM dalam ranga pencari pekerjaan dan mencari nafkah adalah jenis *Livehood Activities*. Penjual di jalanan merupakan contoh dari jenis usaha ini.
- 2) UMKM yang bersifat artisanal kurang mempunyai kualitas sebagai wirausahawan disebut sebagai *Micro Enterprise*.
- 3) UMKM yang pekerjaanya bergerak dibidaang ekspor dan subkontraktor disebut sebagai *Small Dynamic Enterprise*.
- 4) UMKM yang berpeluang untuk menjadi Usaha Besar disebut sebagai *Fast Moving Enterprise*.<sup>16</sup>

#### **d. Peranan UMKM**

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Posisinya sebagai pelaku ekonomi terkemuka di berbagai bidang.
- 2) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar.
- 3) Kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pemrakarsa pasar baru dan sumber inovatif.
- 5) Melalui kegiatan ekspor, memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan neraca pembayaran.<sup>17</sup>

Sejak krisis melanda UMKM, tidak semuanya terpelihara secara efektif, sehingga pemulihan ekonomi kurang optimal. Usaha mikro dan kecil seringkali memiliki keunggulan dalam industri yang mengandalkan sumber daya alam dan membutuhkan tenaga kerja tingkat tinggi, seperti budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. Di industri perhotelan, perbankan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan, usaha menengah memiliki keunggulan dalam hal penciptaan nilai tambah. Industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi, dan pertambangan semuanya diuntungkan dari ukuran perusahaan besar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar semuanya saling melengkapi dalam praktiknya.

---

<sup>16</sup> Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31.

<sup>17</sup> Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2): 40-5, Oktober 2016, h. 42.

Dengan demikian, dengan meningkatkan kinerja UMKM yang menggunakan bahan produksi lokal daripada impor, perekonomian nasional akan lebih kuat.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, fokus utama dalam pembangunan adalah pengembangan koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengidentifikasi enam cara utama untuk mencapai pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Strategi Menciptakan Lingkungan yang Ramah Usaha Pencipta lingkungan usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupaya untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan memperluas peluang usaha, meminimalkan pengeluaran ekonomi yang boros, dan mempromosikan lingkungan serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan yang mendorong iklim usaha yang menguntungkan bagi KUMKM tidak ada di satu instansi tetapi biasanya tersebar di banyak instansi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan otoritas lain untuk menciptakan lingkungan yang ramah bisnis bagi KUMKM. Iklim usaha yang kondusif memerlukan pembentukan kerangka perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaan yang memungkinkan KUMKM untuk bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Evolusi lingkungan bisnis mencakup berbagai faktor, termasuk kebijakan politik, hukum, dan ekonomi makro, serta kolaborasi internasional dan inisiatif pembangunan regional, serta perizinan lintas sektor. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan mendorong penerapan kebijakan, aturan, dan regulasi yang pro-KUMKM.
- 2) Strategi Perluasan Akses KUMKM Terhadap Sumber Daya Produktif Rendahnya produksi KUMKM disebabkan oleh kelangkaan sumber daya produktif. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha harus merancang struktur insentif yang memungkinkan KUMKM mengakses sumber daya produktif untuk menumbuhkan perusahaan dan daya

---

<sup>18</sup> Solikatun, et. al., "Kemiskinan Dalam Pembangunan", *Jurnal Analisa Sosiologi*, III (11): 70-90, April 2014, h. 75

saingnya. Peningkatan selektif akses KUMKM ke sumber daya produktif ini bertindak sebagai stimulan bagi KUMKM dan berkontribusi pada koreksi kelemahan pasar sumber daya produktif yang dihadapi oleh KUMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan mendukung inisiatif untuk memperluas akses KUMKM terhadap kas dan pembiayaan, akses pasar, teknologi, dan informasi. Dengan jumlah KUMKM yang begitu besar, perlu dikembangkan secara efektif. Hal ini dicapai melalui strategi sentral yang disertai dengan pertumbuhan pasar BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.

- 3) Strategi Pengembangan dan Daya Saing Kewirausahaan KUMKM Kewirausahaan merupakan aspek yang paling kritis dalam meningkatkan daya saing KUMKM dan perekonomian nasional. Untuk menopang pembangunan ekonomi, Selama lima tahun ke depan, tambahan 6 juta unit bisnis berbasis pengetahuan dan teknologi akan dibutuhkan. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menetapkan kebijakan untuk mendorong wirausaha baru, serta skema insentif untuk meningkatkan wirausaha KUMKM yang sudah ada, KUMKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan landasan teknis, serta kebijakan manufaktur bersih.
- 4) Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi Berdasarkan Identitas Koperasi Pembangunan koperasi yang sejati merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh Indonesia untuk mencapai demokrasi ekonomi. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pembenahan UU Koperasi, peningkatan penatausahaan dan pengawasan badan hukum koperasi, pembinaan dan fasilitas koperasi, serta pengamanan koperasi dan masyarakat dari kegiatan niaga koperasi. Strategi peningkatan kelembagaan koperasi dirancang untuk memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 70.000 unit koperasi berkualitas tinggi yang mampu menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada lebih dari 20 juta anggota.

- 5) Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Usaha mikro merupakan kategori pelaku usaha terbesar di Indonesia (96 persen), bekerja di sektor informal, dan sebagian besar terdiri dari rumah tangga berpenghasilan rendah. Memang, dalam sebagian besar situasi, organisasi bisnis mikro masih belum mampu menyediakan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Karena karakteristik khusus dari usaha mikro, mereka mungkin tidak diaktifkan dengan baik melalui sistem pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro harus dibentuk sebagai pendekatan tersendiri, yang melibatkan pembentukan kelembagaan usaha mikro, pembentukan lembaga keuangan mikro, dan dorongan pertumbuhan industri pedesaan.
- 6) Strategi Sinergi dan Partisipasi Masyarakat Demokrasi ekonomi diwujudkan dengan sinergi dan pelibatan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan melalui tiga cara: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan KUMKM; dengan meningkatkan kapasitas lembaga pembinaan dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan KUMKM; dan dengan mengembangkan kapasitas kelembagaan UMKM.<sup>19</sup>

#### e. Karakteristik Usaha Mikro

Kekurangan dan kelebihan dari sebuah UMKM merupakan sebuah ciri khusus dari UMKM, berikut beberapa kelebihan UMKM, yaitu:

##### 1) Daya tahan

Pengusaha kecil sangat termotivasi untuk menjamin kelangsungan usahanya karena merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Akibatnya, pemilik usaha kecil sangat mudah beradaptasi dalam menanggapi perubahan kondisi bisnis.

---

<sup>19</sup> Arief Rahman Susila, *Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h. 14

2) Padat karya

UMKM di Indonesia rata-rata merupakan usaha padat karya. Perusahaan kecil memproduksi barang dengan memanfaatkan bakat staf mereka daripada mengandalkan peralatan seperti mesin produksi.

3) Keahlian khusus

UMKM di Indonesia memproduksi berbagai macam barang kebutuhan pokok yang memerlukan keterampilan khusus tetapi tidak memerlukan pendidikan formal. Krampilan khusus ini biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, barang-barang yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia menggunakan teknologi dasar dan murah.

4) Jenis produk

Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia seringkali bernuansa budaya, mencerminkan keunikan pengetahuan daerah. Misalnya, pahatan-pahatan yang ada di kayu maupun rotan.

5) Keterkaitan dengan sektor pertanian

Secara umum, UMKM di Indonesia masih bersifat agraris, karena banyak barang dari hasil pertanian yang dapat ditangani dalam skala lokal tanpa mengeluarkan biaya produksi yang besar.

6) Permodalan

Tabungan, dana dari sumber informal seperti dana pinjaman merupakan jenis atau bentuk modal yang digunakan oleh para pelaku UMKM.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Tambunan, Tulus, T.H. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting. (Jakarta: PT Salemba Empat, 2002), h. 166

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti ( Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani dan Suci Rahmayanti (2020) <sup>21</sup>	Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan	Kualitatif dengan wawancara dan studi pustaka	Pembayaran non tunai telah diterapkan pada pedagang UMKM pada penelitian yang telah dilakukan. Pembayaran transaksi nontunai diadopsi untuk mengikuti kemajuan pesat teknologi dan informasi. Pedagang UMKM telah menerapkan metode pembayaran nontunai berbasis chip dan server di	Penelitian yang dilakukan oleh Josef Evan, tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang penggunaan Quick Response Code	Studi kasus pada perkembangan UMKM pengguna QRIS di Medan. Sedangkan studi kasus yang dilakukan peneliti di Pematangsiantar penggunaan QRIS dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 dan dengan jumlah informan yang berbeda.

<sup>21</sup>JosefEvan Sihaloho, et.al.” Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan” dalam *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 2, April 2020, h. 287-297.

				<p>tempat mereka.</p> <p>Dompot elektronik adalah jenis mekanisme pembayaran berbasis server.</p> <p>Banyak UMKM yang menerima pembayaran melalui aplikasi e-wallet, salah satunya adalah penyediaan QR Code yang dapat langsung diakses dari smartphone pelanggan.</p> <p>Keempat informan yang diperiksa telah memasok berbagai barang e-wallet, antara lain OVO, LinkAja, Gopay, dan lainnya.</p> <p>Namun, OVO adalah yang paling umum</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>digunakan.</p> <p>Karena maraknya produk e-wallet, Bank Indonesia merilis QRIS untuk mengkonsolidasikan QR Code dari beberapa penyedia e-wallet, yang mengharuskan UMKM untuk memberikan satu QR Code untuk semua penyedia e-wallet.</p>		
2.	I Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni (2020) <sup>22</sup>	QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS	Penelitian dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur	Bahwa UMKM cenderung lebih mempercayai rekomendasi teman dekat atau pembeli dalam mengambil keputusan	Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Arta tersebut tidak jauh berbeda dengan	Penelitian saya berfokus pada penerapan QRIS terhadap UMKM di Kota Pematangsiantar dengan menggunakan

<sup>22</sup>I Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni, "QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS" dalam *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9.10 (2020), h.922-923.

				menggunakan QRIS. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga penyebab umkm tidak diminati oleh masyarakat adalah QRIS memerlukan biaya dan mempunyai batasan dalam bertransaksi serta jaringan internet yang buruk menjadi faktor penghambat utama	penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana penelitian yaitu pada dampak pembayaran melalui QRIS	metode kualitatif.
3.	Siti Indah Purwaning Yuwana(2020) <sup>23</sup>	<i>Coronanomics</i> :Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi	Metode kualitatif dengan dua pendekatan, yaitu studi kepustakaa n dan studi deskriptif	Sejak adanya wabah Covid-19, penyebaran pemasaran dan pembayaran digital telah memberikan pengaruh yang baik terhadap	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Indah Purwaning tersebut tidak jauh berbeda dengan	Variabel yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah aspek pemasaran dan transaksi pembayaran, yang erat

<sup>23</sup>Siti Indah Purwaning Yuwana, "Coronanomics :Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19" dalam *journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 47-59.

		Covid-19		kelangsungan usaha UMKM di Kabupaten Jember, yang berarti para pelaku UMKM dapat tetap menjalankan usahanya dengan menerapkan social distance ketika berhadapan dengan pelanggan. UMKM Kabupaten Jember, khususnya di masa Pandemi Covid-19, perlu menggunakan pemasaran dan transaksi digital untuk menjaga kelangsungan operasi jangka panjang dengan gagasan revolusi industri 4.0.	penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pembayaran elektronik atau non tunai melalui Quick Response Code	kaitannya dengan peredaran barang dan omset usaha saat pandemi dan dampak penyebaran Covid-19 di Jember. Sedangkan penelitian saya adalah tentang penerapan QRIS terhadap UMKM di Kota Pematangsiantar
4.	Meliyanti	Strategi Bank	Penelitian	Terjadi	Penelitian	Studi Kasus

	(2021)24	Indonesia KPW KALTENG dalam Perkembangan Pembayaran Non Tunai Melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kota Palangkarya	ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	peningkatan penggunaan pembayaran non tunai oleh Pedagang UMKM di Kota Palang Karya. Covid-19 dapat menyebar jika pembayaran tunai dibatasi. Menyelenggarakan acara sosial dan membantu pedagang mendaftar ke QRIS.	yang dilakukan oleh Meliyanti tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu dampak pembayaran non tunai melalui QRIS	pada strategi Bank Indonesia dalam perkembangan QRIS pada UMKM di Kota Palang Karya. Sedangkan peneliti ialah penerapan QRIS terhadap UMKM di Kota Pematang siantar
5.	Mokhammad Iqbal Hardiky, Devina Kristanti Nova, Amelia Rahmadewi	Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur	Metode Kualitatif merupakan metode yang kami terapkan dalam penelitian	Metode yang efektif untuk membayar barang dan jasa. Bisnis Roti Kasur memiliki banyak konsumen yang memilih untuk	Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Iqbal tersebut tidak jauh berbeda	Studi Kasus pada optimalisasi digital payment sebagai solusi pembayaran UMKM, sedangkan

<sup>24</sup>Meliyanti, "Strategi Bank Indonesia KPW KALTENG dalam Perkembangan Pembayaran Non Tunai Melalui *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada UMKM di Kota Palangkarya" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkarya, 2021), h. 1- 134.

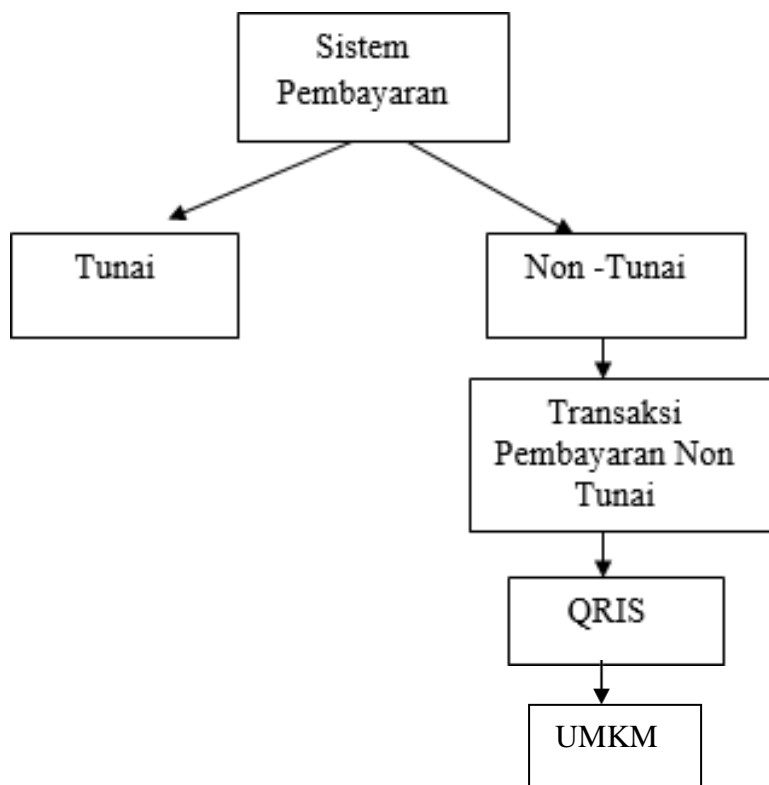
	dan Nanik Kustiningsih (2021) <sup>25</sup>		ini. Proses pemilihan pada penelitian ini menggunakan selective atau subyektif sampling.	membayar menggunakan metode pembayaran digital. Pemilik UMKM menawarkan aplikasi baru berbasis barcode, yang dikenal sebagai QRIS, untuk meningkatkan penjualan. Dengan adanya aplikasi ini, pembeli tidak perlu khawatir akan kesulitan administrasi, dan sistem pembayaran melalui QRIS dapat dilakukan dalam transaksi langsung maupun tidak langsung melalui internet.	dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pembayaran digital melalui Quick Response Code pada UMKM	studi kasus yang dilakukan peneliti adalah penerapan pembayaran non tunai melalui QRIS pada UMKM
--	---	--	--	--	--	--

<sup>25</sup> Mokhammad Iqbal Hardiky, et.al., "Optimalisasi *Digital Payment* Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur" dalam *Jurnal Riset Entrepreneurship*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, h. 44-48.

### C. Kerangka Teoritis

Sebagai satu sistem interaksi antar variabel, kerangka teoritis mencakup banyak teori. Kemudian dievaluasi secara kritis dan hati-hati untuk mensintesa keterkaitan antarvariabel yang diteliti sesuai dengan ide-ide tersebut. Pembentukan hipotesis dimulai dengan sintesis variabel, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dieksplorasi. Untuk lebih memahami topik penelitian, kerangka teoritis harus dikembangkan sebagai dasar untuk penelitian ini. Dengan menggunakan kerangka yang dimaksud, penulis akan dapat menemukan data dan informasi yang mereka butuhkan untuk menjawab kesulitan-kesulitan atau pemmasalahan yang telah di jabarkan sebelumnya

Kerangka teoritis pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Teoritis**

Keterangan:

Bagan diatas menunjukkan bahwa alur penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini pada Sistem Pembayaran pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di kota Pematangsiantar dengan Sistem Pembayaran digital atau non tunai yaitu QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Data kualitatif digunakan sebagai metodologi penelitian ini. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman topik pada tingkat yang lebih dalam daripada mencoba untuk menggeneralisasi tentang suatu permasalahan.<sup>1</sup> Data hasil penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara langsung dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Pematangsiantar yang menggunakan QRIS, kemudian data yang didapat akan di uraikan dalam bentuk narasi dan ada juga data yang berbentuk dokumentasi yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

Wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung akan digunakan untuk mengumpulkan informasi, menyakinkan dan memberikan gambaran yang jelas terkait objek atau permasalahan yang saat ini sedang diteliti dan setelah itu, peneliti harus melakukan analisis yang mendalam untuk menguraikan hasil penelitian hingga pada akhirnya peneliti bisa menarik kesimpulan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Pematangsiantar yaitu Kecamatan Siantar Barat khusus nya terhadap 5 pelaku UMKM pengguna QRIS makanan dan minuman yang lagi nge hits dan di minati saat ini.

---

<sup>1</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.



## 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2021												Des	Jan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov			
1.	Pengajuan Judul Skripsi														
2.	Penyusunan Skripsi														
3.	Bimbingan Proposal Skripsi														
4.	Seminar Proposal Skripsi														
5.	Bimbingan Skripsi														
6.	Sidang Munaqasah														

**C. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi, melainkan hanya sampel yang akan menjadi informan yaitu pelaku usaha UMKM di kota Pematangsiantar pengguna QRIS dan akan ditentukan secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan hanya narasumber yang dapat memberikan informasi relevan dengan tujuan penelitian, juga memiliki pemahaman yang berkaitan secara langsung dengan masalah penelitian. Berikut informan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.2 Identitas Informan**

No.	Nama	Nama Usaha	Jenis Produk	Jenis Transaksi Elektronik
1.	Lila	Keripik Sambal Gaor-Gaor	Keripik Ubi	QRIS
2.	Elvira Tika	Xie Xie Boba	Minuman Boba	QRIS
3.	Rio	Home Made	Risol,	QRIS

	Syahputra	Maknyus	Dimsum, Ayam	
4.	Utiyah Ayu	Fikycha	Minuman Boba	QRIS
5.	Putra	Sibabang Burger	Burger	QRIS

#### D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui proses kegiatan lapangan dan percobaan atau observasi disebut sebagai data primer. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi yang menghasilkan data original atau asli atau data yang pertama yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>2</sup>

##### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui berbagai sumber atau berbagai pihak yang berhubungan dengan objek penelitian disebut sebagai data sekunder. Data-data yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan. Buku, jurnal, majalah, dokumentasi, atau media sosial seperti intagram, youtube merupakan sumber dari data sekunder.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian inipenulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah dialog terstruktur antara dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang menanggapi.<sup>3</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana pewawancara menetapkan topik

---

<sup>2</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2017) h. 69.

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000 )h.135.

permasalahan sendiri dan pertanyaan yang harus dijawab untuk memperoleh tanggapan terhadap hipotesis yang telah ditentukan.

Pewawancara harus dapat menjalin hubungan positif dengan informan agar informan dapat berpartisipasi, merasa nyaman dan bebas dalam berkomunikasi sehingga informan dapat memberikan informasi dengan jelas dan akurat selama proses wawancara berlangsung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan penelitian, hal ini bermanfaat agar topik pembahasan dalam wawancara tetap terfokus pada tujuan yang dimaksudkan dan mencegah topik menjadi terlalu luas. Selain itu, ini berfungsi sebagai acuan dan dapat dikembangkan oleh peneliti melalui penggunaan pertanyaan tambahan saat wawancara dilaksanakan.<sup>4</sup>

## 2. Pengamatan (*Observation*)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang khas dan cukup berbeda dibandingkan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuisisioner atau wawancara, perbedaan ini terjadi pada proses pelaksanaannya. Kuisisioner dan wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dan melakukan komunikasi langsung dengan subjek penelitiannya, maka observasi berbeda, peneliti tidak harus melakukan komunikasi tetapi harus melakukan pengamatan secara mendalam kepada semua objek yang berkaitan dengan topik penelitian, baik itu benda, manusia atau bahkan dokumen-dokumen pendukung. Kegiatan pengamatan atau observasi ini dapat dilakukan dengan melihat langsung kejadian di lapangan dan dapat dilakukan dengan cara partisipan maupun non partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Kota Pematangsiantar dan hal yang diamati adalah penggunaan QRIS UMKM di kota tersebut.

## 3. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan langsung dari berbagai sumber atau referensi kepustakaan yang berkaitan dengan informasi yang akan diteliti disebut sebagai

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet 12, 2002), h. 203.

studi kepustakaan. Laporan, jurnal, majalah, buku dan karya ilmiah merupakan beberapa contoh dari sumber studi kepustakaan yang dapat digunakan oleh peneliti dalam menambah kajian Pustaka penelitian.

#### 4. Dokumentasi

Catatan tertulis dari suatu tindakan, kejadian dan peristiwa yang telah terjadi disebut dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada materi yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam bentuk arsip, data asli, dokumen atau *soft file* lain yang berkaitan dengan penggunaan QRIS oleh UMKM yang dapat digunakan bersamaan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.<sup>5</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonstatistik. Menurut Patton, analisis data adalah tindakan menyusun urutan data, mengkategorikan dan mengklasifikasikannya.<sup>6</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu proses yang dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan pengembangan suatu hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis berdasarkan data, data diperiksa kembali untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh. Jika hipotesis diterima berdasarkan bukti yang diperoleh berulang kali dengan menggunakan teknik triangulasi, hipotesis tumbuh menjadi teori.<sup>7</sup>

Model Milles dan Hubbermand digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini, berikut adalah pendapat mereka yang dikutip oleh Sugiono:

Milles dan Hubberman (1984) mengatakan bahwa selum data jenuh, aktivitas analisis data kualitatif akan terus dilakukan secara interaktif.<sup>8</sup>

Aktivitas dalam model analisis ini meliputi:

<sup>5</sup> Hamid Patlima, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 68.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian...*, h. 103

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 335.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 338.

### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data memerlukan meringkas, memilih yang esensial, berkonsentrasi pada yang kritis, mengidentifikasi pola dan tema, dan menghilangkan yang berlebihan. Dengan demikian, kumpulan data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data tambahan dan mencarinya sesuai kebutuhan. Perangkat elektronik seperti komputer mini dapat membantu pengurangan data dengan menyediakan kode untuk karakteristik tertentu.

Penelitian ini mereduksi data dengan merekam wawancara dan kemudian menyalinnya kata demi kata, dalam laporan hasil penelitian data yang dapat digunakan akan di pilih dan data yang tidak sesuai akan dihapus serta mencari kembali data yang belum diklarifikasi.

### **2. Data Display (Penyajian Data)**

Setelah dilakukan reduksi, peneliti harus melakukan penyajian data atau *display data*. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa penjelasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, dan *flowchart*. Namun, penulisan naratif adalah format yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan memvisualisasikan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya sesuai dengan itu.

Dalam penelitian ini, data disajikan dengan menyusun deskripsi singkat atau teks naratif berdasarkan hasil reduksi data dan hasil wawancara.

### **3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan/Verifikasi)**

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan langkahh ketiga yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Temuan pertama bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukungnya ditemukan selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika temuan yang didapat pada tahap awal didukung oleh bukti asli dan konsisten yang dikumpulkan di lapangan, kesimpulan yang dicapai dapat dipercaya.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang selama kerja lapangan.<sup>9</sup>

Penyajian data dengan pembahasan data menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan penelitian.

### G. Keabsahan Data

Pengecakan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (Validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).<sup>10</sup>

Untuk memverifikasi keakuratan data yang berkaitan dengan “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) Pada Sektor UMKM di Kota Pematangsiantar”, setelah pengumpulan data, ada beberapa tahapan pengujian data yang dilakukan seperti transferabilitas, dan konfirmasi. Rincian berikut berkaitan dengan teknik yang disebutkan di atas:

#### 1. Uji Kredibilitas

Menguji kredibilitas data atau membangun kepercayaan pada data penelitian dapat dicapai dalam berbagai metode dalam penelitian kualitatif, termasuk dengan memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, pembicaraan dengan teman, analisis kasus negatif, dan pemeriksaan anggota.

Namun, hanya beberapa metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan kredibilitas data penelitian:

##### a. Triangulasi

Triangulasi digambarkan dalam konteks pengujian kredibilitas sebagai proses verifikasi data dari berbagai sumber dalam berbagai cara dan pada berbagai periode. Jadi, sumber ditriangulasi, proses

---

<sup>9</sup> Ibid., h. 338-345.

<sup>10</sup> Ibid., h. 366.

pengumpulan data ditriangulasi, dan waktu ditriangulasi. Namun, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi dalam penelitian ini: triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Membandingkan data dari beberapa sumber disebut sebagai triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Sektor UMKM di Kota Pematangsiantar” jadi untuk melaksanakan triangulasi ini maka peneliti harus membandingkan jawaban kemudian membuat kelompok data dengan pandangan yang sama dan pandangan berbeda dari para informan penelitian yaitu pelaku UMKM yang menggunakan QRIS.

2) Triangulasi Teknik

Melakukan perbandingan kepada sumber yang sama dengan menggunakan beberapa teknik disebut sebagai triangulasi teknik, contoh triangulasi ini adalah membandingkan hasil observasi dan wawancara kepada informan penelitian.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung untuk mendukung temuan peneliti disebut sebagai bahan referensi. Peneliti dapat memasukkan foto atau dokumen aktual dalam laporan mereka untuk meningkatkan keandalan temuan penelitian.

c. Mengadakan *member check*

*Member check* adalah proses membandingkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang diberikan oleh penyedia data untuk menentukan seberapa dekat data yang diperoleh dengan data yang disediakan oleh penyedia data. Jika data yang ditemukan disetujui oleh sumber data, ini menunjukkan bahwa data tersebut sah, sehingga meningkatkan kredibilitasnya. Pemeriksaan anggota dapat dilakukan setelah menerima temuan atau kesimpulan.

Penelitian ini mengkaji anggota melalui penggunaan forum diskusi kelompok. Selama diskusi kelompok, peneliti mempresentasikan hasilnya kepada sekelompok penyedia data. Selama diskusi kelompok, data dapat dikurangi, ditambahkan, atau disepakati. Setelah semua pihak menyepakati data tersebut, diminta agar sumber data menandatangani untuk menjamin keabsahannya.

## 2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan validitas eksternal. Validitas eksternal mengacu pada sejauh mana temuan studi akurat atau berlaku untuk populasi dari mana sampel diambil.

Nilai transfer ini mengacu pada sejauh mana temuan studi dapat ditransfer atau digunakan dalam konteks yang berbeda. Nilai transfer penelitian naturalistik tergantung pada pengguna, pada sejauh mana temuan studi dapat diterapkan pada berbagai konteks dan keadaan sosial.

Dengan demikian, agar orang lain dapat memahami temuan penelitian kualitatif ini dan menerapkannya, peneliti menyajikan ringkasan yang lengkap, jelas, metodis, dan akurat dalam laporan ini. Dengan demikian, pembaca memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang temuan penelitian, memungkinkan mereka untuk menentukan apakah temuan tersebut dapat diterapkan di tempat lain atau tidak. Jika pembaca laporan penelitian memperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana temuan studi dapat digunakan (transferabilitas), laporan tersebut memenuhi kriteria transferabilitas.

## 3. Uji Dependabilitas

*Dependability* disebut sebagai reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Suatu penelitian dianggap dapat dipercaya jika dapat diulang atau direplikasi oleh orang lain. Uji ketergantungan dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini, ketergantungan ditentukan oleh auditor atau supervisor yang



tidak memihak yang mengaudit aktivitas penelitian peneliti secara lengkap.

#### 4. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas disebut sebagai uji objektivitas penelitian dalam penelitian kuantitatif. Jika temuan penelitian diterima secara luas, dikatakan objektif. Uji konfirmabilitas sebanding dengan uji keterandalan dalam penelitian kualitatif, dan karenanya kedua uji tersebut dapat dilakukan secara bersamaan.

Pengujian konfirmabilitas memerlukan evaluasi temuan studi dalam kaitannya dengan metodologi yang digunakan. Jika temuan penelitian merupakan fungsi dari metode penelitian, penelitian tersebut memenuhi persyaratan Konfirmasi.<sup>11</sup>

Dengan demikian, supervisor melakukan uji *Confirmability* bersamaan dengan uji *Dependability* dalam investigasi kualitatif ini.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,h, 367-378.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Pematangsiantar

Kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Pematangsiantar. Kota Pematangsiantar terletak strategis karena dilalui oleh Jalan Raya Trans Sumatera dan berjarak sekitar 128 km dari kota Medan. Di Kota ini terdapat sekitar 268.254 jiwa penduduk yang mendiami wilayah seluas 79,97 km<sup>2</sup> di tahun 2020 berdasarkan data statistik dari BPS Provinsi Sumatera Utara.

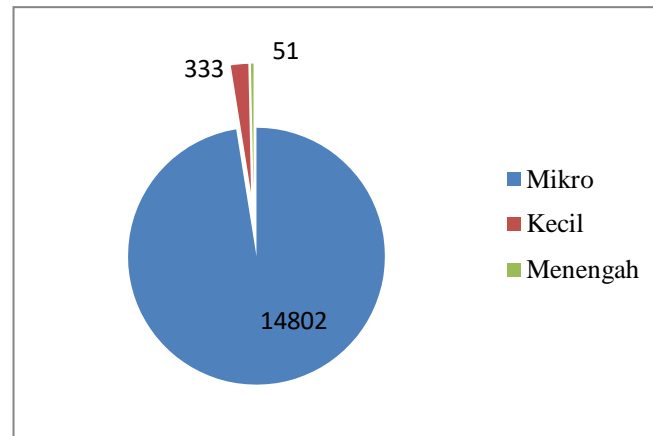
Wilayah kabupaten Simalungun mengelilingi kota pematangsiantar karena kota ini terletak ditengah-tengah kabupaten tersebut secara administratif. Kecamatan Proklamasi merupakan pusat pemerintahan Kota Pematangsiantar yang memiliki 8 kecamatan yang terdiri dari 53 kelurahan dengan jumlah RT berjumlah 1.033 dan RW berjumlah 344. Kecamatan terluas di kota ini adalah kecamatan Sitalasari dengan luas daerahnya sekitar 28,71% dari luas kota Pematang Siantar atau sekitar 22.723 km<sup>2</sup>.

Bagi para wisatawan, Kota Pematangsiantar sering dijadikan sebagai tempat pesinggahan karena jaraknya yang begitu dekat dengan Danau Toba yaitu sekitar 52 Km.

Sepeda motor model lama (BSA) merupakan *icon* atau simbol dari Kota Pematangsiantar karena jumlahnya yang masih banyak ditemukan sebagai alat transportasi becak yang digunakan oleh masyarakat untuk menjelajahi kota ini dan motor jenis ini juga memiliki keunikan karena ketika motor ini digunakan mesin dari motor ini akan menghasilkan suara yang cukup keras.

Industri besar dan industri sedang merupakan tulang punggung perekonomian dari kota Pematangsiantar. Kegiatan ekonomi dari pasar industri menghasilkan Rp 646 miliar atau setara dengan 38,18 % dari total perekonomian di tahun 2020 dan diposisi kedua ada sektor hotel, restoran dan perdagangan yang memberikan kontribusi sekitar Rp 385 miliar atau setara dengan 22,77% dari total kegiatan ekonomi ditahun 2020.

Pelaku usaha di Kota Pematangsiantar terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Siantar Timur, Siantar Barat, Siantar Utara, Siantar Selatan, Siantar Marihat, Siantar Martoba, Siantar Sitalasari, dan Siantar Marimbun. Jumlah UMKM di Kota Pematangsiantar disajikan gambar dibawah ini:



**Gambar 4. 1 UMKM Kota Pematangsiantar**

Sumber: Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2020

Berdasarkan diagram gambar 4.1 dapat diketahui jumlah usaha mikro adalah yang paling banyak di Kota Pematang Siantar atau sekitar 14802, usaha kecil berjumlah 333 dan usaha menengah berjumlah paling sedikit atau sekitar 51 usaha dan usaha ini tersebar di delapan kecamatan. Usaha makanan dan minuman merupakan usaha unggulan di kecamatan Siantar Barat.

Bank Indonesia telah membentuk saluran/sistem pembayaran yang bertujuan untuk menstandarisasi semua transaksi nontunai berbasis server yang melibatkan QR Code. Mekanisme pembayarannya adalah *Quick Response Code Indonsian Standar (QRIS)*. Penerapan QRIS ini telah dilakukan UMKM Pematangsiantar. Kota Pematangsiantar merupakan pengguna terbesar kedua setelah kota Medan. *Driver online*, remaja dan beberapa orang tua merupakan jenis pelanggan yang paling banyak menggunakan QRIS.

Berikut tabel menunjukkan pengguna QRIS di kota Pematangsiantar yang cukup banyak dimana pengguna QRIS di Pematangsiantar setengah dari jumlah seluruh UMKM tahun 2020 dimana jumlah UMKM kota Pematangsiantar mencapai 14.802.

**Tabel 4.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Menggunakan QRIS per Kecamatan**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah UMKM Pengguna QRIS</b>
1.	Siantar Marihat	973
2.	Siantar Marimbun	867
3.	Siantar Selatan	634
4.	Siantar Barat	1726
5.	Siantar Utara	861
6.	Siantar Timur	795
7.	Siantar Martoba	679
8.	Siantar Sitalasari	769
<b>Total</b>		<b>7304</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, 2020

Sektor industri sangat penting di Kota Pematangsiantar karena berperan sebagai motor penggerak pada awal pertumbuhan kota. Industri Kota Pematangsiantar pernah dikenal memproduksi rokok putih dan tepung tapioka untuk ekspor. Saat ini terdapat beberapa industri, antara lain industri makanan, industri tekstil, dan industri logam, serta perusahaan besar/menengah dan kecil.

**Tabel 4.2 Jumlah Unit Industri Besar/Sedang dan Industri Kecil 2020**

<b>NO</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	8
2.	Pengadaan listrik,gas,uap/air panas dan udara dingin	12
3.	Industri pengolahan	721
4.	Pertambangan dan penggalian	23
5.	Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil dan sepeda motor	9.235
6.	Konstruksi	15
7.	Informasi dan komunikasi	17
8.	Penyediaan akomodasi & penyediaan makan minum	132
9.	Pengangkutan dan pergudangan	119
10.	Aktivitas keuangan dan asuransi	39
11.	Real estete	163
12.	Aktivitas penyewaan & sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan penunjang usaha lainnya	12
13.	Aktivitas profesional,ilmiah dan teknik	9
14.	Pendidikan	256
15.	Aktivitas badan internasional &badan ekstra international lainnya	6
16.	Aktivitas kesehatan manusia &aktivitas sosial	185
17.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	3.327
18.	Aktivitas jasa lainnya	523
<b>Total</b>		<b>14.802</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, 2020

Sektor industri secara keseluruhan menghasilkan produksi sebesar 882 miliar rupiah atau 25,5% dari PDRB Kota Pematangsiantar secara keseluruhan. Selain itu, industri ini memberikan kesempatan kerja bagi penduduk sebanyak 18.785 orang (9,41 persen dari total angkatan kerja). Dengan demikian, sektor industri sangat penting bagi Kota Pematangsiantar, karena merupakan

penyumbang PDRB terbesar kedua (setelah sektor perdagangan), dan sebagai sektor basis, keberadaannya menjadi penentu banyak sektor non-dasar/tenaga kerja. Sektor industri Kota Pematangsiantar terintegrasi dengan sistem agrobisnis Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, dimana industri yang beragam seperti pengolahan tepung tapioka, pengolahan jagung, dan sebagainya merupakan sistem sub pengolahan. Sektor industri menyediakan orang-orang terpelajar dengan sarana penghidupan.

## **B. Pembahasan**

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang penerapan sistem pembayaran QRIS di kota Pematangsiantar. Data yang diberikan adalah data mentah yang telah diolah secara kualitatif, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan analisis tambahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, khususnya yang menggunakan QRIS. Selain itu, jurnal dan data lain yang berkaitan dengan QRIS di kota Pematangsiantar. Penyajian ini akan membahas topik penelitian yang muncul selama di lapangan. Deskripsi sistematis dari data penelitian secara keseluruhan tergantung pada ungkapan masalah. Topik kajian difokuskan pada (1) pemahaman pelaku UMKM terhadap QRIS, (2) manfaat QRIS bagi pelaku UMKM, dan (3) hambatan penggunaan QRIS yang dialami pelaku UMKM.

### **1. Pengetahuan Pelaku UMKM Di Kota Pematangsiantar Terhadap QRIS**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM di kota Pematangsiantar melihat bahwa di dalam penggunaan QRIS ini terdapat beberapa pelaku UMKM yang mengetahui sistem pembayaran digital QRIS. Pemahaman UMKM terhadap QRIS ini terdapat tiga yaitu:

#### **a. Kode batang digital**

Hal ini dapat sesuai dengan pernyataan dari Ibu Lila, berikut hasil wawancara dengan Ibu Lila<sup>12</sup> selaku UMKM penjual kripik ubi tentang pengetahuan QRIS, menyatakan bahwa QRIS merupakan sejenis barcode yakni:

---

<sup>12</sup>Lila, pedagang kripik ubi, wawancara di Kota Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

“Saya mengetahui QRIS karena sebagai pelaku UMKM saya diberitahukan oleh pihak Bank Indonesia Pematangsiantar melalui sosialisasi pekan QRIS yang pertama kali menginformasikan tentang pembayaran menggunakan QRIS ini. Jadi QRIS itu *QR Code* yang dibuat Bank Indonesia (BI) untuk memudahkan transaksi dan saya juga mengetahui tentang QRIS sejenis barcode berbentuk pola persegi. Dengan menggunakan QRIS, tidak perlu lagi punya banyak kode QR di usaha saya, karena semua pembayaran satu kode QR”.

Selanjutnya untuk mendukung yang telah dikatakan oleh informan sebelumnya dan di perjelas oleh Ibu Elvira Tika<sup>13</sup> Penjual minuman boba yang menggunakan QRIS, yang dilakukan wawancara pada tanggal 08 November 2021 pukul 11.00 WIB yakni sebagai berikut:

“Sistem pembayaran yang tidak lagi menggunakan uang tunai, dia hanya mengarahkan smartphone ke *QR code* yang telah disediakan oleh UMKM seperti saya ini, maka pembayaran pun telah selesai dilakukan, kita hanya perlu ada saldonya dan tinggal scan QRIS yang disediakan dan saat itu juga langsung terbayar”.



**Gambar 4.2 Wawancara terhadap pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar**

b. Pencatatan transaksi otomatis

UMKM yang terlibat dalam penelitian ini menilai QRIS berperan dalam membantu mereka dalam melakukan pencatatan otomatis/akuntansi digital yang muncul dalam *history of transaction* seperti yang dinyatakan oleh Ibu Lila<sup>14</sup> penjual Kripik Ubi pengguna QRIS. Disini penulis melakukan wawancara pada

<sup>13</sup> Elvira Tika, pedagang minuman boba, wawancara di Kota Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

<sup>14</sup>Lila, penjual Kripik Ubi, Wawancara, 08 November 2021.

tanggal 08 November 2021 pukul 10.00 WIB terkait pencatatan transaksi otomatis yakni sebagai berikut:

“Pembayaran bisa dibuka dari QRIS karena dicatat otomatis, nggak perlu hitung-hitung uang manual, nggak perlu akuntansi. Riwayat transaksi langsung terlihat jadi mudah bagi saya untuk melihat nya. Yang saya rasakan setelah menerapkan QRIS yaitu pemanfaatannya cukup berdampak. Selain memiliki kelebihan, kelemahan dari penggunaan QRIS ini bagi saya pelaku UMKM adalah uang yang saya terima atau transaksi yang terjadi hari ini bisa kami peroleh uangnya itu atau masuk ke saldo kami besok harinya tidak pada saat hari ini”

Hal serupa juga diungkapkan informan yang kedua yaitu Rio Syahputa, yaitu

“Memudahkan saya dalam mencatat keuangan, tidak perlu lagi melakukan pencatatan keuangan secara manual dan memerlukan waktu yang lama. Seluruh kegiatan transaksi sudah terekam secara otomatis dan juga sistematis”.

#### c. Pembayaran digital

UMKM di Pematangsiantar memahami QRIS sebagai alat pembayaran digital yang dapat dilakukan melalui handphone salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Ibu Elvira Tika<sup>15</sup> penjual minuman Boba yang menggunakan QRIS yakni:

“Kayak pembayaran dari penjual pakai barcode. Barcode untuk sistem pembayaran masa kini. Sejak awal QRIS diresmikan di Kota Pematangsiantar saya sudah menerapkan sistem pembayaran QRIS tepatnya dibulan April 2020. Dan sedikit saya jelaskan bahwa awalnya saya menggunakan OVO dan sekarang sudah diubah ke QRIS dan QRIS yang saya ketahui alat pembayaran non tunai atau alat pembayaran digital.”

QRIS merupakan *barcode* dengan dua dimensi yang mengandung informasi dan dapat dibaca dari berbagai arah horizontal. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaku UMKM di Pematangsiantar cukup paham dan mengetahui tentang QRIS sebagai barcode yang di keluarkan bank indonesia, dengan 1 (satu) *QR code* untuk semua transaksi pembayaran non tunai.

Selanjutnya pelaku UMKM di Pematangsiantar menganggap QRIS sebagai metode pembayaran pencatatan transaksi otomatis dimana QRIS dipandang sebagai inovasi dalam mekanisme pembayaran digital. Fasilitas yang diberikan

---

<sup>15</sup>Elvira Tika, penjual Minuman Boba, wawancara, 08 November 2021.





akan terus tumbuh hal ini dipengaruhi oleh kemudahan pelanggan melakukan pembayaran dan cara bisnis memandang kemudahan ini.

## 2. Manfaat dalam Menggunakan QRIS terhadap pelaku UMKM

Masyarakat diharapkan dapat beradaptasi di era digitalisasi saat ini agar dapat mengikuti kemajuan teknologi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lingkungan bisnis yang lebih inovatif dan kompetitif saat ini memerlukan penggabungan teknologi. Orang Indonesia pasti banyak melakukan pembayaran nontunai. Setiap smartphone individu berpotensi memiliki banyak program dompet digital yang diinstal. Teknik transaksi ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai transaksi dari lokasi manapun dan kapanpun. Di antara kemajuan tersebut adalah pembentukan sistem pembayaran digital yang dikenal dengan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. UMKM merasakan manfaat dari QRIS sebagai berikut:

### a. Sangat menguntungkan

UMKM dalam penelitian ini cenderung mengidentifikasi QRIS sebagai media pembayaran yang menguntungkan serta dipandang sederhana dalam penggunaannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Saudara Rio Syahputra<sup>16</sup> selaku penjual makanan Homemade yaitu Dimsum, UMKM pengguna QRIS sebagai berikut:

“Menguntungkan, QRIS ini sangat menguntungkan selain simple dan juga lebih aman, Dan menurut saya sistem pembayaran digital ini dapat membantu dalam bertransaksi secara praktis, jadi konsumen tidak perlu membawa uang tunai dan tidak perlu repotdalam melakukan pembayaran. Tinggal melakukan scan pada QRIS yang telah disediakan.”

Pernyataan senada namun lebih mendalam disampaikan oleh Ibu Utiya Ayu<sup>17</sup> penjual Minuman Boba saat ini yang menggunakan QRIS juga yakni sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Rio Syahputra, penjual makanan HomeMade, Wawancara di Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

<sup>17</sup>Utiya Ayu, penjual minuman hits, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

“Menurut saya pembayaran menggunakan QRIS dengan uang tunai lebih aman karena kita terhindar dari uang tunai yang kotor atau penuh kuman dan lebih aman dari hal-hal kriminal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Dengan QRIS ini lebih mudah karena ketika transaksi akan muncul ditotal pembayarannya, pemasukan untuk penjualan juga cenderung stabil di masa pandemi sekarang ini karena banyak pembeli yang menggunakan QRIS khususnya anak-anak millennial sekarang.”

b. Memberi alternatif metode pembayaran

Seluruh partisipan merupakan UMKM yang berlokasi ditempat yang sama yaitu Kecamatan Siantar Barat merupakan pusat perkotaan dan alternatif pembayaran memiliki peran penting. Seperti dinyatakan oleh Saudara Putra<sup>18</sup> penjual burger yang pengguna QRIS, yakni sebagai berikut:

“Karena nggak perlu ngumpulin uang receh. Jadi kita nggak usah repot-repot sediakan recehan, dan lebih efisien waktu begitu. Dan saya tahu selain sebagai fungsi pembayaran non tunai, QRIS mempunyai kelebihan dibandingkan pembayaran sebelumnya seperti OVO, Gopay, atau Dana itu cuma bisa menerima dari link yang sama contohnya OVO hanya bisa menerima dari OVO tapi QRIS ini dia bisa menerima semua link pembayaran yang ada.”

Dan di pertegas dari pernyataan saudara Rio Syahputra<sup>19</sup> pelaku UMKM pengguna QRIS juga penjual Makanan HomaMade Dimsum sebagai berikut:

“ yaa UMKM UMKM menggunakan QRIS untuk alternatif pembayaran. Jadi menurut saya sih iya karena memudahkan para customer, alat pembayaran yg efisien dan aman, karena orang-orang jarang pakai cash dan lebih sederhana untuk pembayaran menggunakan QRIS”.

c. Mengurangi kontak fisik

Mengingat kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini, banyak UMKM mengalihkan metode pembayarannya untuk mengurangi kontak langsung dengan pelanggan saat membayar. Seperti dinyatakan oleh Ibu Utiya Ayu<sup>20</sup> penjual minuman hits saat ini pengguna QRIS adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Putra, Penjual Buger, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

<sup>19</sup> Rio Syahputra, penjual makanan HomeMade, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

<sup>20</sup> Utiya Ayu, Penjual minuman hits, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

“Kayak yang kita tau sekarang kan ada covid, jadi QRIS ini bisa jadi solusi, karena kondisi pandemi saat ini yang mendorong saya menggunakan QRIS di tempat saya. Pembayaran yang dilakukan secara non tunai juga sangat membantu bagi kita dan para konsumen juga, pembayaran digital ini sangat membantu apalagi dimasa pandemi seperti ini kita dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam penularan virus contohnya dalam memegang uang tunai yang dapat tertular secara cepat.”

Serta diperjelas oleh Ibu Lila<sup>21</sup> penjual Keripik Ubi yang menggunakan QRIS sebagai berikut:

“Saya menggunakan QRIS di penjualan saya karena sangat membantu apalagi disaat pandemi seperti ini yang membuat kita untuk harus berhati-hati dalam penularan virus melalui uang tunai. Pembayaran non-tunai, seperti QRIS, sangat bermanfaat dalam kondisi ini karena mereka menghilangkan kebutuhan untuk berurusan dengan hal-hal fisik, terutama mata uang, yang relatif rentan dalam kondisi ini.”

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwasanya keuntungan penggunaan QRIS dalam bertransaksi. Dampak dari transaksi non tunai ini memberikan keuntungan untuk masyarakat karena masyarakat akan ditawarkan berbagai promo menarik, seperti dalam bentuk *cashback* dan lain-lain yang dapat digunakan *merchant-merchant*. QRIS adalah metode tata kelola yang lebih realistis, hemat biaya, dan transparan. Selain itu, transaksi nontunai dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memungkinkan pelaku usaha untuk melacak semua transaksi secara lebih efisien. QRIS memfasilitasi proses transaksi dengan *barcode* yang memiliki fleksibilitas dalam pembayaran.

Semuanya terasa lebih mudah dan lancar saat melakukan transaksi karena hanya membutuhkan sedikit waktu dan hanya membutuhkan ponsel untuk memindai kode QR. Setelah kode QR dipindai, semua transaksi selesai, dan individu tidak perlu menunggu kembalian karena pembayaran sesuai dengan nominal yang ditentukan. Keunggulan QRIS bagi retailer antara lain kemudahan bertransaksi, yang memungkinkan pelanggan bertransaksi non tunai menggunakan QR; akibatnya, konsumen sekarang dapat membayar dan membeli di lokasi mana pun hanya dengan membawa ponsel cerdas mereka; dengan kemudahan bertransaksi, konsumen akan memilih untuk berbelanja. Secara tidak langsung

---

<sup>21</sup> Lila, penjual kripik ubi, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

akan meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya di Kota Pematangsiantar. Terbentuknya QRIS telah berdampak pada peningkatan pendapatan harian bagi para pedagang UMKM. Peningkatan pendapatan sekitar 5-10% setiap hari untuk trader. Selain itu, beberapa pedagang melaporkan peningkatan pendapatan pada hari Sabtu dan Minggu ketika mereka menggunakan QRIS. Kemudahan disini dimana QRIS dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan salah satunya memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumennya. Peran QRIS adalah untuk melindungi pedagang agar tidak tertipu oleh peredaran uang palsu, membatasi bahaya pencurian uang, dan membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital bagi UMKM Kota Pematangsiantar. Dan juga tidak perlu membawa uang tunai, apalagi di masa pandemi sekarang ini membuat masyarakat harus berhati-hati untuk menghindari penularan virus melalui uang tunai.

*Merchant* UMKM tertentu telah memasang sistem pembayaran QRIS di tokonya meskipun demikian, penggunaannya tidak rutin. Namun, sistem ini tidak menghadirkan tantangan bagi pedagang di toko. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan QRIS cukup menguntungkan dalam proses transaksi. Merchant tidak perlu menyiapkan banyak produk QR Code di tokonya, yang mereka butuhkan hanyalah satu QRIS yang mampu menerima transaksi dari berbagai instrumen pembayaran berbasis server.

Seperti dapat dilihat gambar dibawah pedagang UMKM di Kota Pematangsiantar minuman siboba yang cukup memasang satu barcode yaitu QRIS, tidak perlu memasang banyak barcode pembayaran digital lainnya.



**Gambar 4.4**

**Barcode QRIS pedagang UMKM di Pematangsiantar**

**3. Hambatan Pelaku UMKM dalam penggunaan QRIS**

Bank Indonesia (BI) telah memperkenalkan standar *Quick Response Code (QR)* untuk transaksi uang elektronik menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau *mobile banking*. Kehadiran QRIS mendapat respon yang baik dari berbagai pemangku kepentingan. QRIS diproyeksikan dapat membantu perkembangan ekonomi digital Indonesia. Namun, ternyata penerapan QRIS masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan untuk menumbuhkan transaksi QRIS adalah budaya misalnya, individu yang masih berpikiran apa-apa dalam melihat transaksi menggunakan QRIS sebagai hal baru, yang membuat orang enggan untuk mencoba. Inilah sebabnya mengapa banyak orang saat ini ragu-ragu untuk mencoba, dan mungkin salah satu dari mereka takut akan keamanannya. Oleh karena itu, individu tetap merasa takut saat bertransaksi menggunakan QRIS, karena mereka terbiasa terus-menerus berdagang dengan uang tunai. Adapun kendala UMKM dalam menggunakan QRIS adalah:

- a. Koneksi internet yang tidak stabil

Seperti dinyatakan oleh Saudara Rio Syahputra<sup>22</sup> penjual makanan HomeMade pengguna QRIS adalah sebagai berikut:

“Mungkin pada saat mati lampu gitu nggak ada sinyal, pada saat kehabisan kuota begitu, itu penghambatnya salah satunya. Hmm mungkin koneksi internet yaa. Ketika ada masalah dengan koneksi jaringan, transaksi QRIS tidak dapat diselesaikan. Karena transaksi QRIS sangat penting, maka harus ada koneksi jaringan yang kuat dan konsisten untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan pembeli tidak membatalkan pembelian secara tunai.”

Selanjutnya di pertegas oleh Ibu Lila<sup>23</sup> penjual kripik Ubi pengguna QRIS juga mengatakan bahwa:

“Kalau kesulitannya kita menjelaskan di orang-orang, maksudnya kita sebagai pemakai juga sekaligus kasih edukasi di customer bahwa ada pembayaran online yang seperti ini jadi mereka juga tidak serta merta hanya uang tunai saja, dan terkadang tidak semua orang bisa menerima, maksudnya seperti ada yang bilang, seperti apa sih ini? Bayar tunai saja yang lebih praktis dan misalnya kalau jaringannya terganggu biasa ditransfer kalau konsumen benar-benar tidak pegang uang tunai.”

#### b. Pengenaan biaya penggunaan QRIS

Selain faktor internet yang tidak stabil, kendala yang di hadapi pedagang UMKM menggunakan QRIS yaitu biaya *merchant discount rate (Mdr)*. Disini penulis melakukan wawancara kepada Ibu Elvira Tika penjual minuman Xie Xie Boba pada tanggal 08 November pukul 10.00 WIB yakni sebagai berikut:

“ iyaa,adanya biaya *merchant discount rate* sebesar 0,7% yang diberlakukan kepada para pedagang menurut saya rada memberatkan ya buat saya. Jadi pendapatan harian saya berkurang karena adanya potongan tersebut, alhamdulillah nyaselama masa pandemi sekarang *Mdr* yang dikenakan kepada para pedagang 0%”

Beberapa kendala yang di hadapi saat penerapan digitalisasi pembayaran. Diantaranya adalah dari sisi konsumen, dimana konsumen tertentu masih belum dapat melakukan transaksi melalui internet, terutama budaya atau pola pikir masyarakat yang terbiasa melakukan pembayaran melalui uang tunai, lebih memilih uang tunai daripada QRIS. Untuk meningkatkan transaksi QRIS maka perlu adanya sosialisasi dan edukasi QRIS kepada masyarakat dan pelaku

<sup>22</sup> Rio Syahputra, penjual makanan Homemade, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 08 November 2021.

<sup>23</sup> Lila, penjual Kripik Ubi, wawancara di pematangsiantar, tanggal 08 November 2021

UMKM. Selain itu, warga Pematangsiantar lebih memilih untuk membayar tunai karena QRIS ini berfokus kepada pedagang kelontong.

Kendala lain yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM di Pematangsiantar dan dirasakan masyarakat adalah jaringan yang tidak konsisten. Padahal jaringan sangat penting dalam transaksi QRIS. Jadi, jika jaringan tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, pembayaran mungkin terganggu, dan pada akhirnya, konsumen akan beralih ke transaksi tunai.

Selain itu, pelaku UMKM Pematangsiantar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa QRIS itu sederhana, aman, lugas, dan mendasar. Dengan demikian, transaksi menggunakan QRIS cukup mudah, terutama di era covid-19; itu sangat bermanfaat karena kita tidak memiliki kontak fisik dengan orang atau mata uang; sebaliknya, kita dapat melakukan transaksi dengan aman dan mudah menggunakan smartphone kita. Melalui penggunaan mekanisme pembayaran nontunai seperti QRIS diharapkan dapat memaksimalkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di tengah wabah covid-19 saat ini.

Dalam penggunaan sistem pembayaran menggunakan QRIS, yang menjadi kendala selanjutnya yaitu para pedagang UMKM mengalami ketidakpuasan atas adanya biaya *merchant discount rate (Mdr)* sebesar 0,7% yang diberlakukan kepada para pedagang per transaksi terhadap penjualan. Hal ini akan menyebabkan pendapatan harian pedagang akan berkurang dan juga akan menyebabkan QRIS kurang diminati oleh pelaku UMKM di Pematangsiantar. Tetapi di saat masa pandemi saat ini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan biaya Mdr yang dibebankan kepada para pedagang menjadi 0%.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan pelaku UMKM di kota Pematangsiantar terhadap alat pembayaran digital QRIS yaitu pedagang mayoritas mengetahui QRIS sebagai alat pembayaran digital yang dikeluarkan Bank Indonesia, dimana QRIS ini memberikan kelebihan dibanding sistem pembayaran digital lainnya, seperti OVO, Gopay, Dana dll, transaksinya tercatat otomatis, dan memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran karena tidak perlu menyediakan uang kembalian lagi dan uang receh.
2. QRIS memiliki manfaat bagi pelaku UMKM di kota Pematangsiantar, yaitu kemudahan transaksi. Memudahkan konsumen untuk bertransaksi secara non tunai menggunakan QR Code, masa sekarang masyarakat selalu membawa *handphone* jadi cukup dengan membawa *handphone* konsumen bisa bayar cepat dan belanja di tempat pelaku UMKM yang menggunakan QRIS, dengan kemudahan transaksi itu masyarakat memilih berbelanja dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Serta di masa pandemi sekarang ini QRIS sangat membantu para pelaku UMKM dan pembeli juga, yaitu dapat mengurangi kontak fisik langsung dengan uang tetapi tetap dapat bertransaksi.
3. Hambatan pelaku UMKM menggunakan QRIS yaitu terkendalanya jaringan internet yang kurang stabil dalam melakukan transaksi sehingga menjadi kendala bagi pelaku UMKM dan juga konsumen dalam melakukan transaksi. Serta adanya biaya *merchant discount rate (Mdr)* sebesar 0,07% yang di berlakukan kepada para pedagang. Dan akibat dari hambatan tersebut terkadang sebageian juga masyarakat melakukan pembayaran secara tunai.

## B. Saran

### 1. Bagi Pemerintah

QRIS adalah sebuah inovasi pembayaran digital melalui *QR Code* yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang memungkinkan transaksi lebih cepat, sederhana, murah, aman, dan andal. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap QRIS, guna menumbuhkan pembayaran digital menggunakan *QR Code* berbasis QRIS ini, yang akan berdampak positif terhadap pendapatan UMKM yang telah memanfaatkan pembayaran digital *QR Code* dengan logo QRIS dan juga Pemerintah perlu membenahi infrastruktur komunikasi dan jaringan internet agar semua masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran non tunai.

### 2. Bagi *Merchant* QRIS (UMKM)

UMKM sangat penting dalam mendorong pengembangan gerakan masyarakat tanpa uang tunai/ *cashless society* dan QRIS ini turut andil dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, UMKM yang menerima pembayaran non tunai melalui *QR Code* berbasis QRIS diharapkan dapat mendorong pembeli untuk menggunakan pembayaran non tunai untuk membantu Indonesia bertransisi ke *cashless society* dan mempercepat pembayaran, karena pembayaran QRIS lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih aman, dan lebih dapat diandalkan.

### 3. Bagi Masyarakat

Perlu meningkatkan rasa keingintahuan, rasa kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap teknologi zaman kini khususnya tentang alat pembayaran non tunai, sehingga dapat menggunakan dalam pelaksanaan jual beli dan masyarakat harus dapat membantu dalam mendukungnya dengan memanfaatkan pembayaran digital berbasis *QR Code*, yang akan mempercepat sistem pembayaran di Indonesia dan membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet 12, 2002.
- Ayodya, W. *UMKM 4.0 (Strategi UMKM Memasuki Era Digital)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Bank Indonesia. *Transformasi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*, Laporan Perekonomian Indonesia, 2020.
- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. Bank Indonesia, 2008.
- Evan, Josef Sihaloho, et.al, *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM di Medan*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.17. No.2, April 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Jilid III. Yogyakarta: Andi. 1995.
- Harahap, Isnaini. *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*. Medan : FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Harahap, Muhammad Ikhsan. *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah*. [Laporan Penelitian] UIN SUMUT, 2020.
- Imrawan, Ady dkk. *Analisis Peluang Usaha di Kota Pematangsiantar Menghadapi Destinasi Wisata Danau Toba*, e-jurnal binawakarya, Vol.15 No 1, Mei 2021
- Lexy J. Moloeong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Patlima, Hamid. *Metode Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Pohan, Aulia. *Sistem Pembayaran (Strategi dan Implementasi di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, cet 2, 2013.
- Rahmani, Nur Rahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2016.
- Siregar, Robert Tua, Herry Pandopotan Silitonga, dan Juan Anastasia Putri, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pematangsiantar*, Jurnal Konsep Manajemen dan Bisnis, 6 (2) Mei 2020.

- Solikatun, et. al. "Kemiskinan Dalam Pembangunan".dalam Jurnal Analisa Sosiologi, III (11): 70-90, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017
- Tambunan, T.H.(2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Timotius, Kris H.*Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2017.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an*, Medan : Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Arta setiawan, I wayan dan Mahyuni, Luh Putu.*QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9.10, 2020.
- Bank Indonesia. "Setelah Bunga Acuan Turun, Masih Ribet dengan Banyak QR Code?," dalam Majalah Bank Indonesia Bicara, 2019.
- BI dan LPPI.*Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2015.
- Hendarsyah, D. (n.d) .*Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*
- Harilawati.Wan Laura. *Strategi bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Putra,Adnan."*Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*"dalam Jurnal Analisa Sosiologi, 5(2): 40-5, 2016.
- Reslawati,Ade.*Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Susila, Arief Rahman. *Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Firdaus, Muhammad Ridwan."*E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", Tahkim Vol. XIV, No. 1, 2018.

Nalini, Siti Nuzul Laila. "Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 4 No.1, 2020.

Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33, 2018.  
Tarantang, Jefry dkk. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*, Jurnal Al Qardh, Vol 4, 2019.

Yuli, Rahmini Suci. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1, 2017.

Zulkipli dan Muharir. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*", JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2021.

<https://medan.tribunnews.com>

<https://www.bi.go.id>

**LAMPIRAN**  
**PANDUAN WAWANCARA**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang QRIS?
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan QRIS dalam transaksi bisnis? Jika ya, bisa dijelaskan lebih detail penggunaannya? Jika tidak, apakah berminat menggunakan QRIS?
3. Apakah QRIS berguna dalam mendukung bisnis Bapak/Ibu? Jika ya, mohon disebutkan dan dijelaskan apa saja kegunaannya? Jika tidak, mohon dijelaskan mengapa?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu mudah menggunakan QRIS? Jika ya, mohon dapat di jelaskan. Jika tidak, mengapa? Mohon dapat dijelaskan
5. Apakah ada faktor-faktor yang kira-kira dapat menghambat Bapak/Ibu menggunakan QRIS? Apakah ada faktor yang menjadi kendala dalam menggunakan QRIS?
6. Apakah pembeli pada saat melakukan pembayaran lebih dominan menggunakan pembayaran non-tunai yaitu penggunaan QRIS Bapak/Ibu? Atau lebih dominan melakukan pembayaran tunai?
7. Dengan adanya QRIS ini apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat dalam menggunakan QRIS ini, seperti kemudahan dalam bertransaksi di masa pandemi covid-19 saat ini?
8. Apakah ada peningkatan penjualan sejak Bapak/Ibu menggunakan QRIS ini? Jika ada mohon disebutkan, jika tidak mengapa?

## Lampiran Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : 7960/EB.I/KS.02/10/2021

18 Oktober 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pematangsiantar**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Ayunda Azhari  
NIM : 0501172136  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Maligas, 25 September 1999  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Desa Ujung Maligas Kelurahan Maligas Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Sisingamaraja, Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

*Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) dalam Upaya Pemulihan Sektor UMKM di Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus di Kota Pematangsiantar)*

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 18 Oktober 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



*Digitally Signed*

Dr. Marliyah, M. Ag  
NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

## Lampiran Surat Balasan Izin Riset



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
 Jalan Cempaka No. 2 Pematangsiantar 21113  
 Telepon/ Fax : ( 0622 ) 23766 Email : disperindagps@gmail.com

Pematangsiantar, 29 Oktober 2021

Nomor : 510 / 991 / DKUP / X / 2021  
 Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas  
 Perihal : Data Usaha Mikro Kecil

Kepada Yth,  
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara nomor : 7960/EB.I/KS.02/10/2021 perihal Izin Riset Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) dalam Upaya Pemulihan Sektor UMKM di Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus di Kota Pematangsiantar) sekaitan dengan riset mahasiswa a.n Ayunda Azhari. Untuk itu kami sampaikan data yang di maksud (Terlampir).

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya. Atas kerjasama yang baik terimakasih.

Pt. KEPALA DINAS  
  
 DINAS  
 KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
 PEMATANGSIANTAR  
 PEMBINA TK.I  
 NIP. 19631028198603 1 005

Tembusan :  
 - Walikota Pematangsiantar.